

**BADAN PENANGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA BOGOR**

RENCANA STRATEGIS

2025-2029





SALINAN

WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Undang-Undang Nomor 100 Tahun 2024 tentang Kota Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 286, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7037);
4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 81);



11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 151);
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2024 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.



6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah nasional.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
14. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
15. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
16. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.



17. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
18. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. sistematika rencana strategis;
- b. pengendalian dan evaluasi; dan
- c. perubahan rencana strategis.

Pasal 3

Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini, terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Pendidikan;
- e. Dinas Kesehatan;
- f. Dinas Sosial;
- g. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- h. Dinas Lingkungan Hidup;
- i. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- j. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- k. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- l. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
- m. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- n. Dinas Arsip dan Perpustakaan;
- o. Dinas Tenaga Kerja;
- p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- q. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- r. Dinas Perhubungan;
- s. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- t. Satuan Polisi Pamong Praja;



- u. Dinas Perumahan dan Permukiman;
- v. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- w. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- x. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- y. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- z. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- aa. Badan Pendapatan Daerah;
- bb. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- cc. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- dd. Kecamatan Bogor Tengah;
- ee. Kecamatan Bogor Selatan;
- ff. Kecamatan Bogor Barat;
- gg. Kecamatan Bogor Utara;
- hh. Kecamatan Bogor Timur; dan
- ii. Kecamatan Tanah Sareal.

BAB III SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS

Pasal 4

- (1) Sistematika Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - c. BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan;
 - d. BAB IV : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
 - e. BAB V : Penutup.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah masing-masing.



- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup indikator kinerja Perangkat Daerah serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah masing-masing.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah masing-masing.
- (4) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran Renstra Perangkat Daerah masing-masing.
- (5) Tata cara pengendalian pelaksanaan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

Pasal 6

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila ada perubahan RPJMD.
- (2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam perubahan Renja Perangkat Daerah.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Sebelum Renstra Perangkat Daerah periode selanjutnya ditetapkan, penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun pertama periode pemerintahan Wali Kota terpilih berikutnya.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 5 Desember 2025

WALI KOTA BOGOR,

TTD.

DEDIE ABDU RACHIM

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 5 Desember 2025

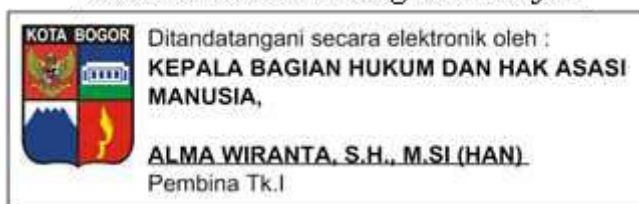
SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

TTD.

DENNY MULYADI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2025 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya



CC. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

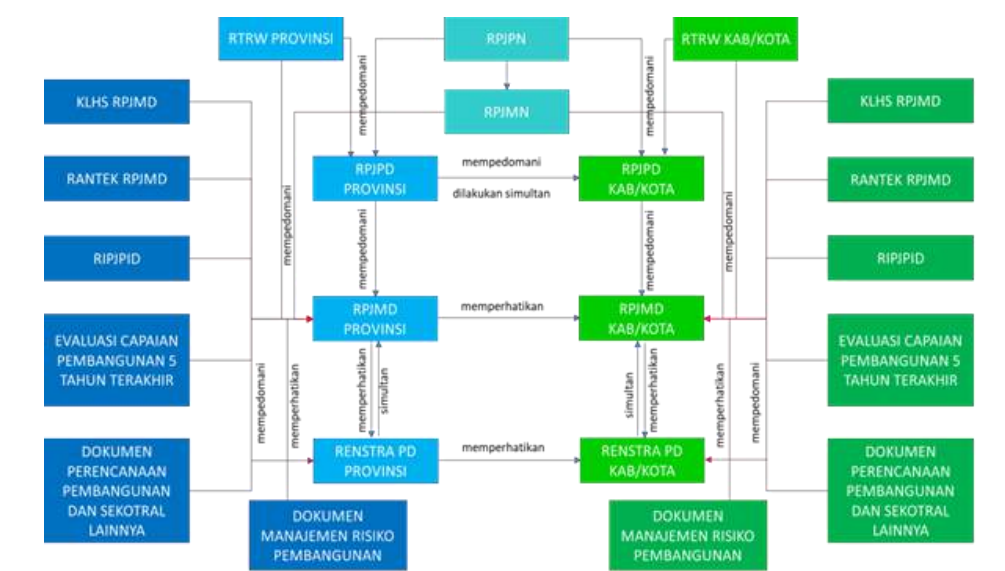
1.1. LATAR BELAKANG

Sebagai amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Perangkat Daerah wajib Menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 agar kebijakan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahunan dapat diimplementasikan dalam rangka pencapaian target kinerja pembangunan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

- Renstra Perangkat Daerah ini berfungsi sebagai:
- a. Dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - b. Instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan Perangkat Daerah; dan
 - c. Kontrak kinerja Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah

Gambar 1. 1.
Keterkaitan Dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya



RPJMD Kota Bogor yang diterbitkan melalui Peraturan Daerah Kota Bogor No. 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bogor, yang memuat Visi: Bogor Beres, Bogor Maju, dengan Misi: Bogor Cerdas, Bogor Sehat, Bogor Sejahtera dan Bogor

Lancar. RPJMD Kota Bogor ini merupakan periode 5 (lima) tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bogor sebagaimana tertuang dalam Perda No. 10 Tahun 2024 tentang RPJPD Kota Bogor 2025-2045 yang mempunyai Visi: Kota Sains Kreatif, Maju dan Berkelanjutan.

Dengan demikian dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah harus mengacu dan mempedomani:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
- b. Rencana Tata Ruang Wilayah
- c. Evaluasi Capaian Pembangunan 5 (lima) tahun terakhir
- d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
- e. Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
- f. Dokumen Perencanaan Sektor lain

Sesuai dengan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029 telah melalui proses koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan penetapan Peraturan Wali Kota Bogor tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Selanjutnya, cakupan layanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor pada Renstra Perangkat Daerah ini berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor serta Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2018, bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor memegang urusan Trantibumlinmas pada sub- urusan bencana.

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi bencana yang sangat besar dengan ragam jenis yang beraneka. Karakteristik geografis, kondisi alam, serta keragaman penduduk dan budaya yang dimilikinya menjadikan Indonesia rentan terhadap berbagai ancaman, mulai dari bencana alam maupun bencana akibat ulah manusia.

Kota Bogor memiliki karakteristik wilayah dengan bentang alam yang cukup beragam, mulai dari topografi bergelombang hingga kawasan yang dilalui oleh banyak aliran sungai. Kondisi geografis tersebut semakin diperparah dengan tingginya curah hujan yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun sebagai dampak nyata dari perubahan iklim global. Di sisi lain, tekanan pertumbuhan penduduk yang pesat, ditambah dengan tingginya aktivitas sosial ekonomi masyarakat, mengakibatkan munculnya kawasan permukiman padat

Situasi tersebut menjadikan Kota Bogor memiliki kerentanan yang tinggi terhadap berbagai jenis bencana. Ancaman bencana yang sering terjadi meliputi banjir akibat meluapnya sungai, tanah longsor pada wilayah perbukitan dan lereng, angin kencang, serta berbagai jenis bencana lain yang berpotensi menimbulkan kerugian besar.

Kompleksitas antara kondisi lingkungan alam dan lingkungan sosial di Kota Bogor semakin memperkuat fakta bahwa wilayah ini termasuk salah satu daerah dengan tingkat risiko bencana yang signifikan.

Dengan kondisi tersebut, Kota Bogor dikategorikan sebagai salah satu wilayah yang memiliki kerawanan terhadap bencana. Oleh karena itu, diperlukan langkah nyata berupa peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai potensi ancaman serta meningkatkan indeks ketahanan daerah. Salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah melalui penyusunan perencanaan penanggulangan bencana secara sistematis. Melalui program penanggulangan bencana yang didasari oleh Rencana Penanggulangan Bencana dalam mengarahkan strategi dalam sasaran penanggulangan bencana dan memaksimalkan Standar Pelayanan Minimal pada sub bidang bencana

Era pembangunan Kota Bogor tahun 2025–2029 ditandai dengan tema “Bogor Beres dan Bogor Maju”. Tema ini menjadi pedoman dalam setiap arah kebijakan pembangunan yang diturunkan ke dalam empat pilar utama, yaitu Bogor Cerdas, Bogor Sehat, Bogor Sejahtera, dan Bogor Lancar. Keempat pilar tersebut tidak hanya mencerminkan visi pembangunan jangka menengah, tetapi juga menggambarkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, pelayanan publik yang berkualitas, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Dalam kerangka tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor memiliki posisi strategis sebagai salah satu perangkat daerah yang berperan langsung dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan khususnya pada misi 2 yakni yang ditujukan dalam Terwujudnya penurunan risiko bencana daerah. Peran tersebut diwujudkan melalui berbagai upaya, antara lain peningkatan kapasitas kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana yang cepat, tepat, dan terkoordinasi, penguatan sistem mitigasi dan adaptasi bencana, serta pembangunan kelembagaan agar lebih mudah dalam bekerja sama pada lintas sektor.

Dalam Rencana Strategis ini ditetapkan tujuan strategis, sasaran, program, serta kebijakan yang akan dijalankan sebagai upaya untuk mempercepat pencapaian pembangunan di bidang penanggulangan bencana serta menurunkan tingkat risiko bencana secara berkelanjutan dan terukur. Renstra juga berfungsi sebagai pedoman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor dalam menyusun rencana kerja tahunan, mengelola sumber daya secara efektif, serta memastikan tercapainya output dan outcome yang optimal sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan arah kebijakan nasional dan prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Bogor Tahun 2025–2029, Renstra ini diharapkan mampu menghadirkan langkah-langkah strategis yang ditujukan agar masyarakat maupun aparatur tanggap dalam mengantisipasi potensi bencana, serta memperkuat kapasitas kelembagaan dan koordinasi lintas sektor.

Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen perencanaan formal, tetapi juga instrumen penting dalam menghadapi tantangan nyata di Kota Bogor, seperti meningkatnya intensitas bencana hidrometeorologi, kerentanan wilayah perkotaan terhadap banjir, tanah longsor serta dinamika perubahan iklim yang semakin

kompleks. Melalui pendekatan tersebut, diharapkan terwujud penurunan risiko bencana daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- e. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
- f. Undang-Undang Nomor 100 Tahun 2024 tentang Kota Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 286, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7037);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- h. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- i. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- k. Nomor 11 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 680)
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- m. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 680)
- n. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi

- dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah;
- o. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
 - p. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
 - q. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 Nomor 7);
 - r. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 121);
 - s. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 3)
 - t. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5);
 - u. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - v. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 151);
 - w. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 163);
 - x. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2029.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RENSTRA

- a. Agar melengkapi maksud penyusunan Renstra:
Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor tahun 2025-2029 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RPJMD Kota Bogor 2025-2029 dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait dengan Urusan Ketentraman dan Ketertiban

Umum serta Perlindungan Masyarakat bidang Penanggulangan Bencan

b. Agar melengkapi tujuan penyusunan Renstra:

Tujuan penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor adalah:

- 1) Menetapkan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan serta program dan indikasi kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor beserta indikator kinerja dan target kinerja pada tahun 2025-2029 dalam rangka menunjang Visi dan Misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2025-2029;
- 2) Memberikan pedoman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (Tahun 2025-2029);
- 3) Menetapkan tolok ukur dan target kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah khususnya dalam pelaksanaan tugas urusan pemerintahan di bidangnya, yang harus dipertanggungjawabkan dalam dokumen LAKIP, LPPD dan LKPJ tahunan dan LKPJ Akhir Masa Jabatan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor 2025-2029 disusun sesuai ketentuan yang diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yakni sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra PD

1.2 Landasan Hukum

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

1.3 Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra PD Tahun 2025-2029.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.2 Gambaran Pelayanan

Memuat sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:

- a. Tugas, fungsi dan struktur PD;
 - b. Sumber daya PD;
 - c. Kinerja penyelenggaraan pelayanan PD;
 - d. Kelompok sasaran pelayanan PD;
 - e. Mitra PD dalam pemberian pelayanan (jikalau ada);
 - f. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja PD [jikalau ada];
 - g. Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab PD (jikalau ada).
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
- a. Mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab II, Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjarangan aspirasi yang dilakukan oleh PD. Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
 - b. Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung. Isu strategis ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain: RPJMN 2025-2029, Renstra K/L, laporan resmi dari lembaga pemerintah/lembaga luar negeri, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, ataupun basil penjarangan aspirasi yang dilakukan oleh PD.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Renstra PD
- a. Menguraikan Visi, Misi, Tujuan Sasaran RPJMD terkait dengan cakupan layanan perangkat daerah dan keterkaitan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah
 - b. Merumuskan arah kebijakan dan strategi untuk mencapai sasaran Perangkat Daerah
 - c. Mempertimbangkan kondisi PD yang ada saat ini, direkomendasikan agar Renstra PD cukup memiliki 1 (satu) tujuan.
 - d. Jika PD mengampu lebih dari satu urusan, tujuan Renstra PD direkomendasikan tetap 1 (satu) dengan menggabungkan kedua urusan dimaksud. Namun untuk sasarannya dapat dirumuskan sesuai dengan masing-masing urusan yang diampu.
 - e. Perumusan tujuan dan sasaran Renstra PD disusun dengan kalimat kondisi, dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, disusun dengan Bahasa yang jelas dan mudah dipahami,

bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta merupakan *intermediate outcome*

- f. Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.
- 3.2 Pentahapan Rencana Strategis Perangkat Daerah
Menguraikan pentahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

- 4.1 Penjenjangan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Menguraikan penjenjangan Kinerja PD merupakan cascading dari tujuan dan sasaran perangkat daerah sampai dengan sub kegiatan terkait beserta indicator kinerjanya.
- 4.2 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Penganggaran Perangkat Daerah
Menguraikan program, kegiatan dan subkegiatan beserta kinerja dan pagu indikatif yang mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.
- 4.3 Target Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, Indikator Kinerja Kunci/Daerah Perangkat Daerah
Menguraikan target IKU, IKK, SPM serta Prioritas Pembangunan Daerah terkait dengan layanan Perangkat Daerah
- 4.4 Rencana Pemenuhan SPM (Hanya Untuk PD Yang Mengampu 6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar)

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. GAMBARAN PELAYANAN

Sesuai dengan Peraturan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 3), Gambaran pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor meliputi penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana dengan bertindak cepat dan tepat, efektif, dan efisien.

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sejalan dengan meningkatnya dinamika dan kompleksitas tugas, dan kebutuhan penguatan kapasitas kelembagaan, BPBD Kota Bogor juga tengah mempersiapkan proses kenaikan tipologi kelembagaan. Rencana peningkatan tipologi tersebut ditargetkan dapat terwujud pada tahun 2027, sehingga BPBD memiliki struktur organisasi, sumber daya, dan kewenangan yang lebih memadai untuk mendukung pelayanan penanggulangan bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor sampai saat ini dalam hal Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor merujuk Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 03 Tahun 2014. Peraturan ditujukan dalam rangka melaksanakan penanggulangan bencana secara sistematis, terencana, terkoordinasi sesuai ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pemerintah Daerah perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai bagian dari Perangkat Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor memiliki tugas dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sub urusan bencana dalam rangka penanggulangan bencana daerah, untuk melaksanakan tugas tersebut, BPBD Kota Bogor memiliki tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
2. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
3. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
5. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
6. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap 1 (satu) bulan sekali dalam

- kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
7. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 8. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
 9. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BPBD Kota Bogor menyelenggarakan menyelenggarakan tugas dan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. perumusan dan penetapan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana dengan bertindak cepat dan tepat, efektif, dan efisien; dan
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Bedasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor, berikut ini adalah tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab organisasi BPBD Kota Bogor:

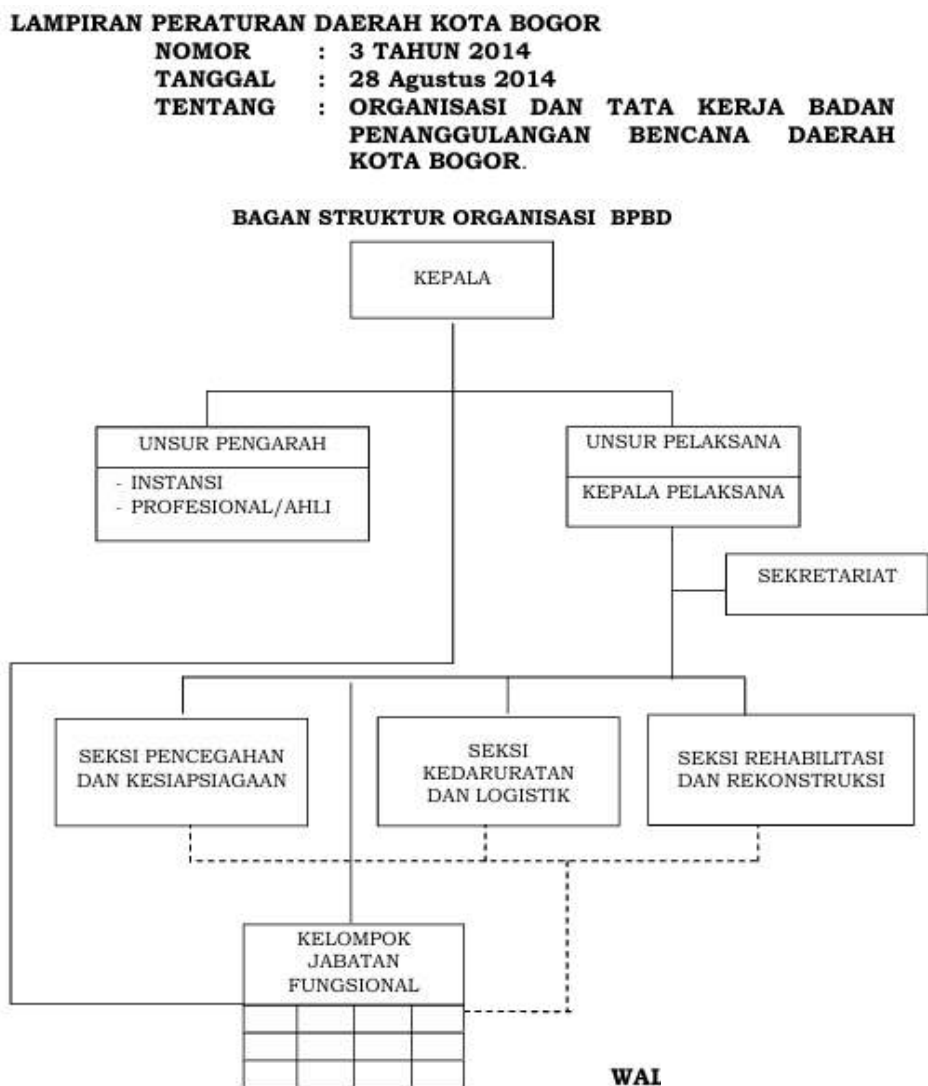
1. Kepala Pelaksana
Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana dan menjalankan tugas Kepala BPBD secara sehari-hari. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pelaksana wajib membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi termasuk tugas reaksi cepat (Tim Reaksi Cepat meliputi kaji cepat dan penyelamatan/pertolongan) dan dapat membentuk satuan tugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan .
2. Sekretariat
Sekretariat Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana, berikut ini tugas Kepala Sekretariat mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam:
 - a. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;
 - b. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
 - d. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pengarah BPBD;
 - e. pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya; dan

- f. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana.
3. Seksi Pencegahan dan kesiapsiagaan
- Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada prabencana, serta pemberdayaan masyarakat. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam:
- a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada prabencana, serta pemberdayaan masyarakat;
 - c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada prabencana, serta pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada prabencana, serta pemberdayaan masyarakat.
4. Seksi Kedaruratan dan Logistik
- Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik. Selain itu membantu Kepala Pelaksana dalam melakukan penyelenggaraan Manajemen Logistik dan Peralatan. Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam:
- a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik;
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik;
 - c. mengelola dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas manajemen logistik dan peralatan terutama pada masa siaga darurat, tanggap darurat, dan pemulihan darurat;
 - d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik; dan
 - e. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik.
5. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan

dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana. Dalam melaksanakan tugas Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam:

- a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana; dan
 - d. pemantauan, evaluasi, dan anlisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.
6. Kelompok Jabatan Fungsional
- Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian. (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang koordinator yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang terdapat di lingkungan BPBD.

Gambar 2. 1.
Bagan Struktur Organisasi BPBD



2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Penerapan prinsip good governance merupakan landasan utama bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif dan demokratis. Prinsip tersebut diwujudkan melalui partisipasi masyarakat, kepastian hukum, transparansi, responsivitas, kesetaraan, visi strategis, efisiensi, profesionalisme, akuntabilitas, serta pengawasan yang berjalan optimal. Sejalan dengan itu, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, terutama penguatan kapasitas sumber daya aparatur, menjadi prioritas strategis yang harus dilaksanakan pada masa kini maupun dalam lima tahun mendatang.

Sebagai perangkat daerah yang memiliki mandat dalam urusan penanggulangan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memikul tanggung jawab besar dalam memberikan layanan, perlindungan, serta pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi potensi dan ancaman bencana. Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut secara efektif, BPBD dituntut menjadi organisasi yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah nyata yang kreatif, inovatif, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Namun, penyelenggaraan pemerintahan yang cerdas hanya dapat diwujudkan apabila BPBD memiliki sumber daya manusia yang kompeten, profesional, dan responsif, serta didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dan berfungsi dengan baik. Kombinasi antara aparatur yang berkualitas dengan dukungan fasilitas yang optimal akan memperkuat kapasitas BPBD dalam menjalankan peran strategisnya dalam penanggulangan bencana di daerah.

2.1.2.1. Sumber Daya Manusia

Pada Tahun 2025 Semester II, jumlah pegawai ASN pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor sesuai data pada Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Kota Bogor (SIMPEG) sebanyak 22 orang, dengan Komposisi dan Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM), sebagai berikut:

Tabel 2. 1.
Rencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia BPBD

No.	Nama Jabatan	Kondisi SDM sampa Semester I 2025 (orang)			Kebutuhan ASN (orang)	Selisih KebutuhanASN (orang)
		PNS	P3K	Total ASN		
1	Kepala Pelaksana	1		1	1	-
2	Kepala Sekretariat	1		1	1	-
3	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1		1	1	-
4	Kepala seksi Kedaruratan dan Logistik	1		1	1	-
5	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi	1		1	1	-
6	Perencana Pertama	0		0	1	1
7	Arsiparis Penyelia	0		0	1	1
8	Arsiparis Mahir	0		0	1	1

No.	Nama Jabatan	Kondisi SDM sampa Semester I 2025 (orang)			Kebutuhan ASN (orang)	Selisih KebutuhanASN (orang)
		PNS	P3K	Total ASN		
9	Arsiparis Terampil	0		0	1	1
10	Analisis Kebencanaan Ahli Madya	0		0	4	4
11	Analisis Kebencanaan Ahli Muda	0		0	5	5
12	Analisis Kebencanaan Pertama	0		0	9	9
13	Penelaah Teknis Kebijakan	4		4	10	6
14	Fasilitator Pemerintahan	1		1	1	-
15	Pengolah Data dan Informasi	1		1	7	6
16	Pengadministrasi Perkantoran	1		1	2	1
17	Pengelola Pencarian dan Pertolongan	0		0	2	2
18	Operator Layanan Operasional	5	3	8	52	44
19	Penata Layanan Operasional		1	1	1	-
20	Pengelola Layanan Operasional		1	1	1	-
Jumlah		17	5	22	103	81

Sumber : Analisis 2025

Pada tabel 2.1 di atas, terkait kebutuhan sumberdaya ASN pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor, menunjukkan perbandingan antara kondisi eksisting jumlah ASN sampai dengan Semester I Tahun 2025 dengan kebutuhan ideal ASN yang telah ditetapkan. Pada tabel tersebut, terlihat jumlah ASN yang tersedia di beberapa jabatan ada yang sudah sesuai dengan kebutuhan dan ada pula yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan.

Pada tabel di atas, jumlah ASN yang tersedia sebanyak 22 orang ASN, sementara kebutuhan mencapai 103 orang, sehingga masih terdapat kekurangan 81 orang ASN. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara umum terdapat perbedaan antara kondisi eksisting jumlah ASN sampai dengan Semester I Tahun 2025 dengan kebutuhan ideal ASN yang telah ditetapkan pada jabatan jabatan tertentu. Oleh karena itu, strategi pengadaan, redistribusi, dan pengembangan pegawai perlu diarahkan untuk menutup kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan. Hal ini sangat penting untuk dilakukan dalam penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor 2025–2029, khususnya dalam konteks perencanaan manajemen ASN yang lebih efektif dan efisien.

Sejalan dengan hal tersebut, perlu juga disampaikan bahwa kelembagaan BPBD Kota Bogor direncanakan akan berproses menuju kenaikan tipologi pada tahun 2027. Proses peningkatan tipologi

ini akan berdampak pada penambahan fungsi, kewenangan, serta beban kerja organisasi, sehingga menuntut adanya penguatan kapasitas kelembagaan, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan ASN yang ideal dan penyediaan sarana prasarana yang memadai. Dengan demikian, perencanaan kebutuhan ASN sejak dini menjadi sangat penting agar BPBD siap menghadapi tuntutan organisasi pada saat tipologi yang lebih tinggi mulai diberlakukan. Guna memastikan terpenuhinya kebutuhan sumber daya yang kompeten, diperlukan penyusunan rencana pengembangan kompetensi, yang selanjutnya dapat ditampilkan pada tabel berikut.

tabel 2.2.
Rencana Pengembangan Kompetensi Sumberdaya Manusia Melalui Jalur Pendidikan BPBD Kota Bogor

No.	Jenis Jabatan	Nama Jabatan	Syarat Minimal Pendidikan	Jumlah Pegawai Eksisting	Jumlah Pegawai Eksisting yang Memenuhi Syarat Minimal Pendidikan	Jumlah Pegawai Eksisting Berdasarkan Pendidikan		Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7		8
1	Administrator	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor	D-IV/S I	1	1	S-2/ Pascasarjana	1	
2	Pengawas	Kepala Sekretariat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor	D-IV/S I	1	1	S-1/Sarjana	1	
		Kasi Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor	D-IV/S I	1	1	S-1/Sarjana	1	
		Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor	D-IV/S I	1	1	S-2/ Pascasarjana	1	
		Kasi Rehabilitasi dan Rekontruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor	D-IV/S I	1	1	S-2/ Pascasarjana	1	
3	Pelaksana	Perencana Pertama	D-IV/S I	0	0	0	0	
		Arsiparis Penyelia	D-IV/S I	0	0	0	0	
		Arsiparis Mahir	D-IV/S I	0	0	0	0	
		Arsiparis Terampil	D-IV/S I	0	0	0	0	
		Analisis Kebencanaan Ahli Madya	D-IV/S I	0	0	0	0	
		Analisis Kebencanaan Ahli Muda	D-IV/S I	0	0	0	0	
		Analisis Kebencanaan Pertama	D-IV/S I	0		0	0	

No.	Jenis Jabatan	Nama Jabatan	Syarat Minimal Pendidikan	Jumlah Pegawai Eksisting	Jumlah Pegawai Eksisting yang Memenuhi Syarat Minimal Pendidikan	Jumlah Pegawai Eksisting Berdasarkan Pendidikan		Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7		8
		Penelaah Teknis Kebijakan	D-IV/S I	4	4	S-1/Sarjana	4	
		Fasilitator Pemerintahan	D-IV/S I	1	1	D-IV/Sarjana	1	
		Penata Layanan Operasional	D-IV/S I	1	1	S-1/Sarjana	1	
		Pengolah Data dan Informasi	D-III	1	1	S-1/Sarjana	1	
		Pengelola Pencarian dan Pertolongan	D-III	0	0		0	
		Pengelola Layanan Operasional	D-III	1	1	D-III	1	
		Pengadministrasi Perkantoran	SLTA/Sederajat	1	1	SLTA/Sederajat	1	
		Operator Layanan Operasional	SLTA/Sederajat	8	8	SLTA/Sederajat	8	

Sumber: BKPSDM, 2025

Pada tabel 2.2 di atas, terkait rencana pengembangan kompetensi pegawai melalui jalur pendidikan formal pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor, menggambarkan data yang mencakup jenis jabatan, nama jabatan, syarat minimal pendidikan, jumlah pegawai yang ada, kesesuaian pendidikan dengan persyaratan, serta rekomendasi pengembangan pendidikan lebih lanjut. Dengan demikian, pada tabel tersebut memberikan gambaran mengenai kondisi aktual kualifikasi pendidikan pegawai sekaligus arah perbaikan yang diperlukan kedepannya. Syarat minimal Pendidikan sesuai dengan ketentuan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kualifikasi Pendidikan berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 4190/8-BM.02.01/SO/K/2024, tanggal 20 juni 2024, Hal: Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Pada tabel tersebut di atas, terlihat bahwa untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Adminstrator memiliki syarat minimal pendidikannya adalah S-1/D-IV. Untuk Jabatan Pengawas memiliki syarat minimal pendidikannya adalah D-III/Sarjana Muda. Untuk Jabatan Fungsional memiliki syarat minimal pendidikannya adalah S-1/D-IV atau D-III/Sarjana Muda. Dan untuk Jabatan Pelaksana syarat minimal pendidikannya adalah SMA/Sederajat.

Tabel 2.3.
Rencana Pengembangan Kompetensi Sumberdaya Manusia Melalui Jalur Pelatihan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor

NO.	Jenis Jabatan	Nama Jabatan	Jumlah Pegawai Eksisting	Rencana Pelatihan Tahun 2025-2029	Jumlah Pegawai yang akan Mengikuti Pelatihan Tahun 2025-2029
1	2	3	4	5	6
1	Administrator	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor	1	Pelatihan Teknis Manajemen Bencana	1
2	Pengawas	Kepala Sekretariat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor	1	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	1
				Pelatihan Teknis Manajemen Bencana	1
				Pelatihan Teknis Manajemen SDM Aparatur	1
				Pelatihan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah	1
		Kasi Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor	1	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	1
		Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor	1	Pelatihan Teknis Konvensi Hak Anak	1
				Pelatihan Teknis Manajemen Bencana	1
				Pelatihan Teknis PBJ Dasar	1
		Kasi Rehabilitasi dan Rekontruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor	1	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	1
				Pelatihan Teknis Manajemen Bencana	1
3	Pelaksana	Operator Layanan Operasional	8	Pelatihan Teknis Manajemen Bencana	1
				Pelatihan Teknis Operasional Penanggulangan Bencana	5
		Penelaah Teknis Kebijakan	4	Pelatihan Teknis AI for Content Creation	1
				Pelatihan Teknis Manajemen Bencana	2
				Pelatihan Teknis Penanggulangan Bencana	1
				Pelatihan Teknis Pengelolaan Pusat Pemulihan Bencana (DRC)	1
		Pengadministrasi Perkantoran	1	Pelatihan Teknis Administrasi Perkantoran	1
		PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	1	Pelatihan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah	1
Jumlah			19		24

Sumber: BKPSDM, 2025

Pada Tabel 2.3 di atas terkait Rencana Pengembangan Kompetensi Sumberdaya Manusia Melalui Jalur Pelatihan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor, berisi gambaran perencanaan program pelatihan yang akan dilaksanakan pada periode tahun 2025–2029. Tabel ini memuat data jenis jabatan, nama jabatan, jumlah pegawai yang ada saat ini, rencana pelatihan yang akan diikuti, serta jumlah pegawai yang direncanakan mengikuti pelatihan. Tujuan utama dari tabel ini

adalah untuk memastikan setiap jabatan memiliki arah pengembangan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Pengembangan kompetensi sumber daya manusia melalui jalur pelatihan sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan dan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK) yang sudah disusun oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bogor.

Jika dikelompokan, Pada Tahun 2025 Jumlah Pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor sebanyak 72 orang dengan 22 ASN dan 50 Non ASN Berikut adalah jumlah berdasarkan kualifikasi pendidikan formal, pangkat golongan, pejabat struktural sebagaimana tabel dibawah

1) Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

Tabel 2.4.
Jabatan Struktural dan Fungsional pada BPBD Kota Bogor

No.	Jabatan Struktural	Jenis Kelamin		Jumlah Seluruh
		Laki-laki	Perempuan	
1	Eselon II b			
2	Eselon III a	1		1
3	Eselon III b			
4	Eselon IV a	2	2	4
5	Eselon IV b			
6	Jabatan Fungsional			
7	Staf	15	2	17
Jumlah		18	4	22

Sumber: Sekretariat BPBD Kota Bogor, 2025

2) Berdasarkan Status Kepegawaian

Tabel 2.5.
Status Kepegawaian pada Pegawai BPBD Kota Bogor

No	Jabatan Struktural	Jenis Kelamin		Jumlah Seluruh
		Laki-laki	Perempuan	
1	PNS	17	5	22
2	TKS/Outsourcing	41	9	50
Jumlah		58	14	72

Sumber : Sekretariat BPBD Kota Bogor, 2025

3) Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Tabel 2.6.
Latar Belakang Pendidikan Pegawai BPBD Kota Bogor

No.	Jabatan Struktural	Jenis Kelamin		Jumlah Seluruh
		Laki-laki	Perempuan	
1	S3			
2	S2	1	2	3
3	S1	6	2	8
4	D4		1	1
5	D3	1		1

No.	Jabatan Struktural	Jenis Kelamin		Jumlah Seluruh
		Laki-laki	Perempuan	
6	D2			
7	D1			
8	SLTA	10		10
9	Dibawah SLTA			
Jumlah		18	4	22

Sumber : Sekretariat BPBD Kota Bogor, 2025

4) Berdasarkan Pangkat/Golongan

Tabel 2.7.
Pangkat/Golongan Pegawai BPBD Kota Bogor

No.	Jabatan Struktural	Jenis Kelamin		Jumlah Seluruh
		Laki-laki	Perempuan	
1	Golongan IV	1	2	3
2	Golongan III	8	2	10
3	Golongan II	4		4
4	Golongan I			
5	Golongan IX		1	
6	Golongan VII	1		
7	Golongan V	3		
Jumlah		17	5	22

Sumber : Sekretariat BPBD Kota Bogor, 2025

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor hingga tahun 2025 masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia. Hal ini ditunjukkan dengan kondisi terkini, dimana dalam peta jabatan yang ada masih terdapat kekosongan sebanyak 82 formasi jabatan yang belum terisi. Kekurangan ini tentunya menjadi tantangan dalam upaya optimalisasi kinerja organisasi, mengingat kebutuhan akan tenaga aparatur yang memadai sangat penting untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD dalam penanggulangan bencana secara efektif dan berkelanjutan.

2.1.2.2. Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, setiap perangkat daerah memerlukan dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang peningkatan efisiensi serta produktivitas kerja, menjamin kelancaran dan mutu pelayanan publik, mempermudah koordinasi antarunit, menciptakan kenyamanan sekaligus kepuasan kerja pegawai, serta menjaga keberlanjutan usia pakai aset melalui pemeliharaan yang tepat. Rekapitulasi barang dan inventaris kantor yang termasuk dalam kelengkapan sarana dan prasarana, beserta rencana kebutuhan barang dan inventaris kantor BPBD Kota Bogor hingga Tahun 2029, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8.
Rencana Pemenuhan Barang Milik Daerah Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kota Bogor

No.	Jenis Sarana Prasarana	Satuan	Kondisi sampai dengan 2024 (unit)			Rencana Pengadaan (unit)						Jumlah Akhir 2030
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Gergaji Mesin	Unit	14		3			5	5		5	28
2	Sepeda Motor Perorangan	Unit	5						2		2	19
3	PC All in one	Unit	9		1		2	1	1	1	1	14
4	Pulley	Buah	3		1			2				5
5	Helm Rescue	Buah	15				15					30
6	Tali Karamantel	Rol	1					2	2			5
7	Full Body Harnes	Buah	7					20				27
8	Baju Selam	Set	3	1				2		1		5
9	Inflatable Kayak	Unit						2				2
10	Pelampung Lifejacket	Buah	12				15					27
11	Printer	Unit	16		4		2					18
12	Dispenser	Unit	2		1		2		1	2		7
13	Nitecore Senter LED	Buah					20					20
14	Cressi BCD	Buah	3		1		2					5
15	AC Split 1 PK	Unit	17		1		2	1	1	1	1	23
16	EWS	Unit	2		1			1				3
17	Amscub Diving Flashhigh	Buah	2		1			1				4
18	Scanner	Unit	3	1					1			5
19	UPS	Unit	5		3		2					7
20	Kursi Tunggu	Unit	2				2					4
21	Kendaraan Mobil Pelayanan (KIE Kebencanaan)	Unit						1				1
22	Mesin Steam Cuci Kendaraan Lapangan	Unit						1	1			2
23	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Roda 2	Unit	7			2			2		2	13
24	Meja Partisi	Unit	8					4	4			20
25	Bangku Tunggu Besi	Unit	2					2				4
26	Lemari Penyimpanan Peralatan	Unit						1			1	2
27	Rak Penyimpanan Logistik	Buah						6				6
28	Mesin Steam Kendaraan	Unit						1	1			2
29	Mobil KIE	Unit						1				1
30	Autostop Descender	Buah	2				2		2			6
31	Perahu Karet	Unit	7							1	1	9
32	Tenda Pengungsi/Pleton	Unit	8		2				1		1	10
32	Laptop	Unit	14		2		2	1	1	1	1	20
33	Mobil Pick Up	Unit	1						1			2
34	Amscub Scuba Tank 80cuft	BUah	2					1				3
35	Cressi BCD	Buah	2		1		2			2		6

No.	Jenis Sarana Prasarana	Satuan	Kondisi sampai dengan 2024 (unit)			Rencana Pengadaan (unit)						Jumlah Akhir 2030
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
36	Drone dji 3 pro	Unit	1					1				2
37	Server dan Storage Data Kebencanaan	Set							1			1
38	PC Unit Spek Medium-High	Unit						1			1	1
39	Notebook	Unit						1	1	1		3
40	CCTV	Unit						16				16
41	NVR	Unit						1				1
42	Interactive Board/White Board	unit									1	1
43	Kamera Konferensi	Unit								1		1
44	Power Bank/Solar Charge/Power Station	Unit						1				1
45	Mobil Dapur Umum	Unit	1				1					
46	Full Body Harnest Petzl	Unit					1					
47	Descender Petzl	Unit					2					
48	Nitecore Senter LED	Unit					20					
49	Amscub Scuba Tank 80cuft	Unit					1					
50	HT	Unit					6	6	6	6	6	30
51	Sarung Tangan Spesialisasi Rescue	Unit					5	10	10	10	10	45
52	Helm Rescue	Unit					10	10	10	10	10	5
53	Perahu Kayak	Unit					1	1		1		3

Sumber : Sekretariat BPBD Kota Bogor, 2025

Tabel 2.9.
Rencana Pemenuhan Sarana Prasarana untuk Pelayanan Publik
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor

No.	Jenis Sarana Prasarana	Ketersediaan		Kondisi sampai dengan 2024			Rencana Pengadaan (unit)						Jumlah Akhir 2030
		Tidak Ada	Ada	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
A	FASILITAS PENDUKUNG												
1	Ketersediaan parkir roda dua dan roda empat: terdapat pemisahan yang jelas antara kendaraan roda 2 dan 4 yang diberikan marka.		✓	2				1					3
2	Petugas parkir		✓										
3	Pemeriksaan karcis/kartu parkir	✗											
4	CCTV Lokasi Parkir		✓	4				2					6
5	Penitipan jaket/helm		✓	1									
6	Pelindung (Kanopi/atap bahan lain)		✓	2				1					3
B	FASILITAS WAJIB												
1	Kursi tunggu		✓	2				2					4
2	Pendingin/sirkulasi ruangan	✗						1					1
C	FASILITAS PELENGKAP												
1	Mesin antrian dilengkapi monitor	✗											
2	Televisi	✗											
3	Bahan bacaan		✓										
4	Pengisi daya baterai alat komunikasi/charger booth	✗											

No.	Jenis Sarana Prasarana	Ketersediaan		Kondisi sampai dengan 2024			Rencana Pengadaan (unit)						Jumlah Akhir 2030
		Tidak Ada	Ada	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5	Hotspot/ wifi		✓	1				1					2
6	Air minum		✓										
D	TOILET LAYAK PAKAI												
1	Toilet pria dan wanita		✓	11				1					12
2	Wastafel		✓	8	2								8
3	Toiletries		✓	2									2
4	Air bersih		✓										
5	Monev intensitas petugas membersihkan toilet	✓											
E	SARPRAS KELOMPOK RENTAN												
1	Kursi roda/tongkat/kruk		✓	2	1								2
2	Pintu masuk yang mudah diakses		✓	2									2
3	Step lobby/ramp/jalan landai dengan pegangan rambat		✓										
4	Lift khusus disertai huruf braille	✗											
5	Selasar yang menghubungkan semua ruangan		✓	1									1
6	Toilet disabilitas	✗						2					
7	Loket Prioritas	✗											
8	Ruang tunggu khusus		✓	1									
9	Guiding block/jalur pemandu		✓										
10	Area parkir khusus		✓	2									
11	Alat bantu		✓										
12	Arena bermain anak / area ramah anak		✓										
13	Ruang Laktasi		✓										
14	Petugas Pemandu		✓										
15	Ruang Tenang	✗											
F	SARPRAS PENUNJANG												
1	Fotocopy/ATK		✓										
2	P3K		✓	1				1					2
3	APAR		✓										
4	Kantin	✗											
5	Ruang Ibadah		✓	2									2
6	Jalur evakuasi/titik kumpul		✓										
7	Tempat Sampah		✓	2									2
8	Tempat Penitipan Anak/Tempat Bermain Anak		✓										
9	CCTV		✓										
G	SARANA FRONT OFFICE												
1	Petugas khusus		✓										
2	Meja/kursi		✓										
3	Layar/display informasi		✓										
4	Bahan cetak informasi layanan		✓										
5	Register tamu (manual/elektronik)		✓										
H	SARANA PRASARANA RUANG KONSULTASI DAN PENGADUAN												
1	Kotak saran/pengaduan	✗						1					1
2	Ruang khusus		✓										
3	Petugas khusus		✓										
4	Air minum/makanan ringan		✓										
5	Register Konsultasi dan Pengaduan		✓	1									1
6	Publikasi informasi terkait mekanisme konsultasi dan		✓										

No.	Jenis Sarana Prasarana	Ketersediaan		Kondisi sampai dengan 2024			Rencana Pengadaan (unit)						Jumlah Akhir 2030
		Tidak Ada	Ada	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	pengaduan (poster/spanduk/leaflet/buku/dokumen/bahan cetak lain)												

Sumber : Sekretariat BPBD Kota Bogor, 2025

Selain itu, dalam rangka mempercepat penerapan pemerintahan berbasis digital, Bapperida telah menjalankan tugas fungsinya dengan menyediakan layanan berbasis digital melalui pemanfaatan berbagai Sistem Informasi, antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.10.
Sistem Informasi yang Digunakan Untuk Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor

No	Sistem Informasi Existing				Rencana Pengembangan				
	Nama Sistem	Data yang dihasilkan	Tahun Pembuatan	Instansi Pembuat	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Peta Digital	data kejadian bencana dan peta operasi meliputi lokasi kejadian, lokasi pengungsian, jalur / rute operasi, lokasi faskes, topografi	2023	BPBD Kota Bogor		✓		✓	
2.	Inarisk	data potensi ancaman bencana, kerentanan (populasi, fisik, ekonomi, lingkungan), kapasitas, dan risiko bencana		BNPB	-	-	-	-	-
3.	istem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD	Data Perencanaan dan Penganggaran serta penatausahaan Keuangan	2019	Kement erian Dalam Negeri	-	-	-	-	-
4.	Istem Informasi Pelaksanaan Keuangan (KUARTA)	Data penatausahaan keuangan	2025	BRIN	-	-	-	-	-
5.	Sistem Informasi Administrasi Pembangunan (SIABANG)	Data Realisasi Kinerja Sub Kegiatan		Bagian Adbang Setda Kota Bogor	-	-	-	-	-
6.	Sstem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	Pengadaan Barang dan JAsa		LKPP	-	-	-	-	-
7.	Ecatalog	Pengadaan Barang dan Jasa		LKPP	-	-	-	-	-
8.	E-spm Bangda	Capaian kinerja SPM Trantibum Limnas		Direktorat Jenderal Bina Pembangu nan Daerah	-	-	-	-	-
9.	Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE)	Surat Menyurat		Dinas Kominfo	-	-	-	-	-
10.	Sibadra	Pengaduan masyarakat		Dinas Kominfo	-	-	-	-	-
11.	Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan	Pengaduan Masyarakat		Kement erian Dalam	-	-	-	-	-

No	Sistem Informasi Existing				Rencana Pengembangan				
	Nama Sistem	Data yang dihasilkan	Tahun Pembuatan	Instansi Pembuat	2026	2027	2028	2029	2030
	Pengaduan Online Rakyat (LAPOR)			Negeri					
12.	Sistem Aplikasi Akuntabilitas Pemerintah (SADAYA)	Data Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Internal Kinerja dalam rangka Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	2025	Pemerintah Kota Bogor	-	-	-	-	-
13.	Sistem Pengukuran Reformasi dan Birokrasi (SURABI)	Data Evaluasi Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik untuk Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		Pemerintah Propinsi Jawa Barat	-	-	-	-	-
14.	Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)	Data Kepegawaian		BKPSDM	-	-	-	-	-
15.	Sstem Infoemasi Barang Milik Daerah (SIMASDA)	Data Perencanaan dan penatausahaan Barang Milik Daerah		BKAD	-	-	-	-	-
16.	Sistem Informasi Aspirasi Perencanaan dan Pemantauan Pembangunan (SIAPMANG)	Data Usulan Musrenbang, Usulan Pokok Pikiran DPRD,	2022	Bapperida	-	-	-	-	-

Sumber : Sekretariat BPBD Kota Bogor, 2025

2.1.3. Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja dapat dipahami sebagai hasil kerja yang dicapai oleh suatu organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan sesuai dengan sasaran program maupun kegiatan yang telah ditetapkan. Pada BPBD Kota Bogor, bentuk pelayanan yang diberikan tidak hanya ditujukan bagi masyarakat secara luas dalam konteks penanggulangan bencana, tetapi juga mencakup pelayanan kepada seluruh pegawai internal serta para pemangku kepentingan (stakeholder) di lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Pelayanan tersebut diarahkan untuk mewujudkan tata kelola penanggulangan bencana yang lebih efektif. Sejalan dengan hal tersebut Rencana Kinerja BPBD pada periode Tahun 2019-2024. Selanjutnya untuk mengevaluasi capaian kinerja BPBD selama periode tahun 2019-2024, dapat dilihat dari sejauh mana ketercapaian tujuan dan sasaran serta ketercapaian kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Selain itu kinerja pelayanan BPBD Kota Bogor juga dapat dilihat dari ketercapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024. Seluruh Ketercapaian tersebut secara rutin di monitoring setiap tahunnya yang nantinya akan digunakan sebagai bahan evaluasi untuk menilai sejauh mana keberhasilan BPBD Kota Bogor dalam mencapai tujuan dan

sasaran strategisnya. Seluruh kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan serta Indikator Kinerja Kunci yang menjadi tanggung jawab BPBD Kota Bogor dapat dilihat dalam tabel beriku, capaian kinerja pelayanan BPBD Kota Bogor dapat dilihat dari hasil pelaksanaan Rencana Strategis periode sebelumnya, yakni tahun 2020 sampai dengan 2024, yang disajikan secara lebih rinci pada tabel berikut ini:

Tabel 2.11.
Target dan Realisasi Tujuan, Sasaran, dan Program Renstra BPBD Tahun 2020-2021

Tujuan	Sasaran	Outcome	Program	Indikator	Target		Realisasi		Capaian (%)	
					2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tujuan 1: Terwujudnya masyarakat Kota Bogor yang aman dari bencana melalui pengurangan risiko bencana berbasis partisipasi masyarakat dan dunia usaha				Indeks Risiko Bencana (IRB)	63.94	60.57	75,75	65,38	118,5	107,9
	Sasaran 1: Meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam Pengurangan Risiko Bencana (PRB)			Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana	2	2	-	-	-	-
				Jumlah Sekolah Aman Bencana	2	2	-	-	-	-
			Program 1.1.1: Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana	2	2	-	-	-	-
				Jumlah Sekolah Aman bencana	2	2	-	-	-	-

Tujuan	Sasaran	Outcome	Program	Indikator	Target		Realisasi		Capaian (%)	
					2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Terwujudnya tata kelola urusan pemerintah bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang efektif, efisien, dan akuntabel				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	3,32	3,35	3,34	3,35	100,6	100
	Meningkatnya kualitas tata kelola pelayanan Badan Penanggula ngan Bencana Daerah (BPBD)			Nilai AKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	B	BB	BB	BB	100	100
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	3,32	3,35	3,34	3,35	100,6	100
			Program 2.1.1 Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Presentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti	90	90	-	-	-	-
				Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	B	BB	B	BB	100	100

Tujuan	Sasaran	Outcome	Program	Indikator	Target		Realisasi		Capaian (%)	
					2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan	80	85	100	100	125,0	117,6
			Program 2.1.2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	80	85	100	100	125,0	117,6
			Program 2.1.3: Pelayanan administrasi Perkantoran	Pelayanan administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100	100	100	100	100	100
Tujuan 2: Terwujudnya penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinir dan komprehensif				Rata-rata respon time penanganan bencana	<24 Jam	<24 Jam	<24 Jam	<24 Jam	<24 Jam	<24 Jam
	Sasaran 1: Meningkatkan respon time penanganan bencana			Rata-rata respon time penanganan bencana	<24 Jam	<24 Jam	<24 Jam	<24 Jam	<24 Jam	<24 Jam

Tujuan	Sasaran	Outcome	Program	Indikator	Target		Realisasi		Capaian (%)	
					2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Program 3.1.1: Program Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Rata-Rata Respon time penanganan bencana	<24 Jam	<24 Jam	<24 Jam	<24 Jam	<24 Jam	<24 Jam
	Sasaran 2: Meningkatnya kualitas data dan Informasi systemperingatan dini kerawanan bencana dan data informasi untuk dukungan pemulihan pasca bencana			Persentase ketersediaan informasi kebencanaan yang tersampaikan ke masyarakat	100	100	100	100	100	100
			Program 3.2.1: Pengembangan layanan Informasi Kebencanaan	Persentase informasi kebencanaan yang tersampaikan ke masyarakat	100	100	100	100	100	100
			Program 3.2.2: Pemulihan Pasca Bencana	Persentase Ketersediaan data dan informasi dampak serta kebutuhan pasca bencana	100	100	100	100	100	100

Sumber: Hasil Evaluasi BPBD Kota Bogor, 2025

Tabel 2.12.
Target dan Realisasi Tujuan, Sasaran, dan Program Renstra BPBD Kota Bogor Tahun 2022-2024

Tujuan	Sasaran	Outcome	Program	Indikator	Target			Realisasi			Capaian (%)		
					2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tujuan 1 : Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel				Indeks Reformasi Birokras	A	A	A	BB	BB	BB	68,0 %	89,1 %	99,1
	Meningkatnya kualitas tata kelola pelayanan badan penanggulangan bencana daerah kota bogo			Presentase peningkatan layanan penanggulangan bencana	100	100	100	-	-	-	-	-	-
		Meningkatnya Kualitas Tata kelola Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel di BPBD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	A	A	A	B	BB	BB	82,5	89,6	93,9
				Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	3,4	3,4	3,5	3,5	3,55	3,54	102,9	102,9	99,7 %

Tujuan	Sasaran	Outcome	Program	Indikator	Target			Realisasi			Capaian (%)		
					2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tujuan 1 : Terwujudnya pelayanan penanggulangan bencana yang cepat, tanggap, efektif dan terkoordinasi berbasis teknologi				Presentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan penanggulangan kebencanaan	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Sasaran 1.1. : Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana berbasis teknologi yang handal			Presentase ketersediaan informasi kebencanaan berbasis teknologi informasi	100	100	100	100	100	N/A	100	100	N/A

Tujuan	Sasaran	Outcome	Program	Indikator	Target			Realisasi			Capaian (%)		
					2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Meningkatnya Pelayanan Informasi Penanggulangan Bencana di Kota Bogor	PROGRAM Penanggulangan Bencan	Pelayanan informasi kebencanaan yang tersampaikan ke masyarakat	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Tujuan : Terwujudnya penanggulan gan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinir dan komprehensif guna mencegah terjadinya kemiskinan akibat dari dampak bencana				Presentase peningkatan sistem penanggulangan bencana yang efektif	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Tujuan	Sasaran	Outcome	Program	Indikator	Target			Realisasi			Capaian (%)		
					2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Meningkatnya respon time penanganan bencana			Rata-rata respon time penanganan bencana	<24 Jam	<24 Jam	<24 Jam	<24 Jam	<24 Jam	<24 Jam	<24 Jam	<24 Jam	<24 Jam

Tujuan	Sasaran	Outcome	Program	Indikator	Target			Realisasi			Capaian (%)		
					2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan Bencana di Kota Bogor	PROGRAM Penanggulangan Bencan	Presentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan penanganan	N/A	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,00	100,0 0
Terwujudnya ketahanan keluarga terhadap bencana				Persentase kelompok masyarakat tangguh bencana	100	100	100	27.94	33.8	36.76	27,9	33.8	36.76

Tujuan	Sasaran	Outcome	Program	Indikator	Target			Realisasi			Capaian (%)		
					2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Meningkatnya peran serta keluarga di dalam masyarakat untuk pengurangan risiko bencana			Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengurangan risiko bencana	100	100	100	44.44	38.46	86.11	44.44	38.46	86.11
		Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan Bencana di Kota Bogor	PROGRAM Penanggulangan Bencan	Presentase kelurahan tangguh bencana	32,35	41,18	50	27.94	33.8	36.76	86	82.8	73.52
				Presentase sekolah aman bencana	4,12	5,2	6,27	6,4	8	16.38	155,3	153.85	156

Sumber : Hasil Evaluasi BPBD Kota Bogor, 2025

Dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor 2019-2024, telah ditetapkan terdapat 2 Tujuan dan 5 sasaran Renstra Perangkat Daerah Kinerja Utama antara lain:

1. Presentase peningkatan layanan penanggulangan bencana
2. Presentase ketersediaan informasi kebencanaan berbasis teknologi informasi
3. kebijakan Rata-rata respon time penanganan bencana
4. Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengurangan risiko bencana
5. Indeks Reformasi Birokrasi tingkat Perangkat Daerah

Untuk pencapaian 5 Indikator Kinerja Utama tersebut, didukung dengan 2 Program antara lain Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan Program Penanggulangan Bencana, dengan total 6 indikator program.

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2019-2024, masih ada 4 indikator kinerja utama BPBD yang belum tercapai 100% antara lain:

1. Presentase peningkatan layanan penanggulangan bencana
2. Presentase ketersediaan informasi kebencanaan berbasis teknologi informasi
3. Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengurangan risiko bencana
4. Indeks Reformasi Birokrasi tingkat Perangkat Daerah

Adapun 1 indikator kinerja lainnya telah mencapai target, antara lain:

1. Kebijakan Rata-rata respon time penanganan bencana

Sementara itu, dari 6 Indikator Program yang telah ditetapkan terdapat. Terdapat indikator yang tidak tercapai antara lain:

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah
2. Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah
3. Presentase kelurahan tangguh bencana

Adapun-indikator kinerja lainnya telah mencapai target, antara lain:

1. Presentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan penanganan
2. Pelayanan informasi kebencanaan yang tersampaikan ke masyarakat
3. Presentase sekolah aman bencana

Faktor Pendukung dan faktor penghambat pencapaian kinerja utama Bapperida Tahun 2019-2024 antara lain adalah:

Tabel 2.13.
Tabel Faktor Pendorong dan Penghambat Capaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor

No.	Tujuan/ Sasaran/ Program	Program	Indikator	Capaian Tertinggi dan Terendah 2020 - 2024 (%)	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Permasalahan	Tindak Lanjut
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola pelayanan badan penanggulangan bencana daerah kota bogor		Indeks Reformasi Birokrasi	68,0 %- 99,1 %	Partisipasi dari para seksi yang yang kebersamai serta pelaksana perencanaan untuk membantu proses jalannya program, kegiatan dan sub kegiatan.	masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia aparatur, baik dari sisi kompetensi maupun profesionalisme, serta terbatasnya jumlah SDM yang tersedia sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan organisasi secara optimal. Dari sisi perencanaan, target kinerja yang ditetapkan belum sepenuhnya terukur dan berorientasi hasil, sehingga implementasi reformasi birokrasi belum berjalan maksimal. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung juga menjadi kendala dalam pelaksanaan program, ditambah dengan pengelolaan barang milik daerah yang belum optimal	Proses administrasi, pemanfaatan, serta pemeliharaan barang belum efisien sehingga menghambat efektivitas pelayanan publik.dan Kompetensi, integritas, dan profesionalisme aparatur belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi. Serta Sasaran dan target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan belum sepenuhnya terukur	Melakukan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi terhadap Indikator Kinerja Utama BPBD Kota Bogor itu sendiri, serta melakukan studi banding untuk meningkatkan sistem kerja dan perencanaan pada internal opd. Selain itu mendorong program, kegiatan dan sub kegiatan untuk terus berjalan dengan baik.
2.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel di BPBD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	82,5 %- 100		perencanaan yang belum optimal dan kurangnya komitmen di antara pegawai	belum dapat mencapai nilai akuntabilitas	Melakukan monitorig dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan dalam mendorong program, kegiatan dan sub kegiatan.

No.	Tujuan/ Sasaran/ Program	Program	Indikator	Capaian Tertinggi dan Terendah 2020 - 2024 (%)	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Permasalahan	Tindak Lanjut
			Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	99,7%-102,9%	Mekanisme pengumpulan data yang kurang fleksibel dan bisa mengupulkan data melalui media sosial	tidak semua penerima layanan mengisi formulir. Sebagian besar penerima layanan BPBD berada dalam situasi darurat, sehingga banyak di antaranya yang tidak dapat mengisi formulir tersebut.	Nilai rata-rata indeks kepuasan masyarakat kurang maksimal	Melakukan strategi dan evaluasi terhadap hasil penilaian layanan yang diterima. Dan Menyusun strategi untuk memberikan formulir pelayanan kepada penerima layanan.
	Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana berbasis teknologi yang handal		Presentase ketersediaan informasi kebencanaan berbasis teknologi informasi	0- 100%	Terdapat Anggaran dari pusat dan provinsi untuk menunjang sarana prasarana jalannya kegiatan	karena perencanaan yang belum optimal dan kurangnya komitmen di antara pegawai.dan Perencanaan yang tidak tepat dan tidak matang atau tidak realistis dalam menetapkan target kinerja dapat menyebabkan indikator kinerja tidak tercapai	Persentase ketersediaan informasi kebencanaan menunjukkan kondisi yang kurang baik dan Realisasi persentase ketersediaan informasi kebencanaan pada tahun 2024 tidak terealisasi sama sekali karena tidak menganggarkan papan rambu kebencanaan	Menetapkan target yang realistis dan terukur, disertai dengan perencanaan sumber daya yang memadai. Dan Meningkatkan Kerja Sama Antar seksi , Kerja sama yang solid antara berbagai seksi dalam OPD dapat memastikan perencanaan dan pelaksanaan program berjalan dengan lancar
	Meningkatnya Pelayanan Informasi Penanggulangan Bencana di Kota Bogor	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan informasi kebencanaan yang tersampaikan ke masyarakat	100%-100%	Koordinasi penanganan Pascabencana. Selain memberikan informasi kepada masyarakat, BPBD juga memiliki peran penting dalam koordinasi penanganan pascabencana	Perencanaan pengembangan sistem informasi kebencanaan belum terstruktur	Belum maksimalnya sistem Informasi kebencanaan.	Mengembangkan serta mengoptimalkan sistem informasi kebencanaan berbasis teknologi agar data dapat diakses secara cepat, tepat, dan akurat. Lewat peta bencana dan Memperkuat komunikasi dan koordinasi lintas sektor
	Meningkatnya respon time penanganan bencana		Rata-rata respon time penanganan bencana	100%-100%	Tim petugas yang ditugaskan untuk penanggulangan bencana telah dibagi	Dalam satu hari dapat terjadi lebih dari satu kejadian bencana, sehingga beban penanganan melebihi kapasitas tim yang tersedia dan	beban penanganan melebihi kapasitas tim yang tersedia	Melaksanakan evaluasi berkala terhadap jadwal tugas serta menyesuainya dengan kebutuhan lapangan. Memperkuat koordinasi

No.	Tujuan/ Sasaran/ Program	Program	Indikator	Capaian Tertinggi dan Terendah 2020 - 2024 (%)	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Permasalahan	Tindak Lanjut
						berdampak pada sedikit terhambatnya proses penanggulangan. Tingginya intensitas bencana dalam waktu berdekatan		antarinstansi dan Menyusun strategi respon cepat
	Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan Bencana di Kota Bogor	PROGRAM Penanggulangan Bencan	Presentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan penanganan	0-100%	Terdapat berbagai layanan logistic seperti perlindungan sosial dengan respon cepat, pemberian bantuan logistik baik itu berbentuk terpal dan hunian sementara. Dengan SDM yang sudah dibagi tugas dan kewajibannya.	Tingginya intensitas bencana dalam waktu berdekatan dan Distribusi bantuan logistik terkadang terkendala akses menuju lokasi terdampak, terutama di wilayah rawan dan sulit dijangkau.	Tingginya frekuensi bencana dan sulitnya akses ke wilayah terdampak menghambat kelancaran distribusi bantuan logistik.	Memperkuat koordinasi antarinstansi dan Menyusun strategi respon cepat
	Meningkatnya peran serta keluarga di dalam masyarakat untuk pengurangan risiko bencana		Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengurangan risiko bencana	44.44%-86.11%	Adanya jalur undangan sebagai nara sumer untuk mengisi sosialisasi terkait kebencanaan di setiap sekolah	Perencanaan untuk peningkatan persentase dalam program SPAB kurang matang, yang menyebabkan kesulitan dalam mencapai hasil yang optimal serta target yang ditetapkan besar	Pembentuk sekolah SPAB tidak sesuai Indikator Kinerja Kunci pada PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 37 TAHUN 2019	Menetapkan target yang lebih realistis dan dapat dicapai, dengan mempertimbangkan kondisi dan sumber daya yang ada. Dan menyesuaikan penetapan SPAB sesuai dengan PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 37 TAHUN 2019
	Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan Bencana di Kota Bogor	PROGRAM Penanggulangan Bencan	Presentase kelurahan tangguh bencana	73.52%-86	Mayarakat memiliki inisiatif untuk berpartisipasi dalam kegiatan kebencanaan. Dan Dukungan kebijakan dan regulasi yang mendorong pembentukan Keltana	Target belum mempertimbangkan kondisi riil kemampuan SDM dan SDA	Penetapan target Kelurahan Tangguh Bencana tidak sesuai dengan kondisi riil jumlah kelurahan yang mampu memenuhi indikator	Menetapkan target yang lebih realistis dan dapat dicapai, dengan mempertimbangkan kondisi dan sumber daya yang ada serta sasaran yang tepat

No.	Tujuan/ Sasaran/ Program	Program	Indikator	Capaian Tertinggi dan Terendah 2020 - 2024 (%)	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Permasalahan	Tindak Lanjut
			Presentase sekolah aman bencana	156-153.85	Sekolah-sekolah menunjukkan minat tinggi dalam membentuk SPAB demi keamanan warga sekolah.	Kegiatan tidak mengacu pada regulasi daerah PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 37 TAHUN 2019 dan ditujukan lewat jalur undangan	Penggunaan dana non- APBD dan tidak sesuai dengan perwaki	Melakukan review terhadap pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan ketentuan dalam Perwali, termasuk aspek perencanaan, pelibatan

Sumber : Sekretariat BPBD Kota Bogor, 2025

Selanjutnya berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan pada Peraturan Wali Kota Bogor perubahan atas peraturan wali kota nomor 71 tahun 2019 tentang rencana strategis badan penanggulangan bencana daerah tahun 2019-2024, sebelum dilakukan perubahan, hasil evaluasi capaian kinerja pada Tahun 2020-2021 dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.14.
Target Realisasi Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2020-2021

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Capaian Kinerja	
				2020		2021		2020		2021		2020	2021
				Target	Rp	Target	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	%	%
1	Program 1.1.1: Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana	Kelurahan	2	1,250	2	1,325	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Sekolah Aman bencana	Sekolah	2		2		-	-	-	-	-	-

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Capaian Kinerja	
				2020		2021		2020		2021		2020	2021
				Target	Rp	Target	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	%	%
	Kegiatan 1.1.1.1 Pelatihan dan Pemberdayaan Kelurahan Tangguh Bencana	Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana	Kelurahan	2	200	2	225	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan 1.1.1.2 Penerapan Sekolah Aman Bencana (SMAB) dan Simulasi Penanggulangan Bencana di Sekolah	Meningkatnya wawasan siswa, tenaga pendidik, komite sekolah terhadap sekolah yang aman bencana (Membentuk sekolah aman bencana)	Sekolah	2	150	2	175	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan 1.1.1.3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Menyediakan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Paket	1	200	1	225	N/A	N/A	1	65	N/A	100
	Kegiatan 1.1.1.4 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontijensi	Tersedianya dokumen rencana penanggulangan bencana dan kontijensi	Dokumen	2	200	1	125	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Capaian Kinerja	
				2020		2021		2020		2021		2020	2021
				Target	Rp	Target	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	%	%
	Kegiatan 1.1.1.5 Peningkatan Kapabilitas Relawan Bencana Alam	Meningkatkan Kapabilitas masyarakat anggota komunitas/ kelompok dalam penanggulangan bencana	Paket	2	200	2	225	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan 1.1.1.6 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi bagi Aparatur	Terlatihnya aparat pemkot kota bogor sub-urusan kebencanaan	Paket	1	200	1	225	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan 1.1.1.7 Simulasi Kebencanaan	Gladi Kesiapsiagaan bencana	Paket	1	100	1	125	-	-	-	-	-	-
2	Program 2.1.1 Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Presentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti	%	90	50	90	50	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Capaian Kinerja	
				2020		2021		2020		2021		2020	2021
				Target	Rp	Target	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	%	%
		Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	Point	B		BB		B		BB		100	100
		Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan	%	80		85		100		100		125,0	117,6
	Kegiatan 2.1.1.1: Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan	Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan BPBD	Dokumen	1	50	1	50	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Program 2.1.2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	%	80	1,800	85	2,100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Capaian Kinerja	
				2020		2021		2020		2021		2020	2021
				Target	Rp	Target	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	%	%
	Kegiatan 2.1.2.1: Pengadaan Inventaris Kantor	terpenuhinya kebutuhan inventaris kantor	Paket	1	1,000	1	1,250	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan 2.1.2.2: Pemeliharaan Inventaris Kantor	terpenuhinya pemeliharaan inventaris kantor	Paket	1	800	1	850	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Program 2.1.3: Pelayanan administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	%	100	2,000	100	2,200	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan 2.1.3.1: Pengelolaan Rumah Tangga PD	Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional OPD	%	100	2,000	100	2,200	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Capaian Kinerja	
				2020		2021		2020		2021		2020	2021
				Target	Rp	Target	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	%	%
5	Program 3.1.1: Program Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Rata-Rata Respon time penanganan bencana	Jam	<24	1,350	<24	1,650	<24	N/A	<24	N/A	<24	<24
	Kegiatan 3.1.1.1 Pengadaan Logistik bagi Korban Bencana	Barang dan jasa yang dibutuhkan untuk penyediaan logistik bagi korban bencana	Paket	1	200	1	225	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan 3.1.1.2 Hunian Sementara bagi Korban Bencana	Barang dan jasa yang dibutuhkan untuk penyediaan hunian bagi korban bencana	Tahun	1	150	1	175	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan 3.1.1.3 Pelayanan Penanggulangan Bencana	Tersedianya Barang dan jasa yang dibutuhkan untuk pelayanan penanggulangan bencana	Tahun	1	1,000	1	1,250	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6	Program 3.2.1: Pengembangan layanan Informasi Kebencanaan	Persentase informasi kebencanaan yang tersampaikan ke masyarakat	%	100	300	100	175	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan 3.2.1.1: Komunikasi,	Terselenggaranya komunikasi, informasi, dan	Tahun	1	150	1	175	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Capaian Kinerja	
				2020		2021		2020		2021		2020	2021
				Target	Rp	Target	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	%	%
	Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	edukasi rawan bencana kepada masyarakat per jenis ancaman bencana											
	Kegiatan 3.2.1.2: Penyusunan Kajian Risiko Bencana	Penyusunan Kajian Risiko Bencana	Dokumen	1	150	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7	Program 3.2.2: Pemulihan Pasca Bencana	Persentase Ketersediaan data dan Informasi dampak serta kebutuhan pasca bencana	%	100	300	100	330	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan 3.2.2.1: Penyusunan Dokumen Kaji Kebutuhan Pasca Bencana	Tersedianya dokumen jitupasna bagi stakeholder terkait kebencanaan	Dokumen	1	100	1	110	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Capaian Kinerja	
				2020		2021		2020		2021		2020	2021
				Target	Rp	Target	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	%	%
	Kegiatan 3.2.2.2: Pendataan Inventarisasi Dampak Pasca Bencana	Tersusunnya dokumen pendataan inventarisasi dampak bencana	Dokumen	1	100	1	11	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan 3.2.2.3: Pelatihan Teknis Penilaian Damage and Losses Assesment (DALA)	Pelatihan bagi aparatur 75 orang	Orang	75	100	75	110	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : Hasil Evaluasi BPBD Kota Bogor, 2025

Pada Tahun 2022, terjadi perubahan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 yang ditetapkan melalui Peeraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perybahan Perda Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Bogor 201-2024, yang selanjutnya di tindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Wali Kota Bogor tentang Rencana Strategis BPBD Kota Bogor 2019-2024. Adapun capaian kinerja BPBD selama periode Tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.15.
Target Realisasi Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022-2024

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Capaian Kinerja		
				2022		2023		2024		2022		2023		2024		2022	2023	2024
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	%	%	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	Point	A	745	A	780	A	845	B		BB		BB		82,5	89,6	93,9
		Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	Point	3,4		3,4		3,5		3,5		3,55		3,54		102,9	102,9	99,7
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat	Laporan	5	8,5	5	9	5	9,5	5	4,2	5	3,4	5	2,3	100	100	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	4	6	4	6	4	4	4,2	4	3,4	4	2,3	100	100	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	Persentase	100	2,933	100	3,206	100		100	3.036	100	3.155	100	3.717	100	100	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	19	2,933	19	3,206	19		19	3.036	19	3.155	19	3.717	100	100	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kepegawaian perangkat daerah	Persentase	100	256	100	255	100	255	100	241	100	253	100	209	100	100	100

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Capaian Kinerja		
				2022		2023		2024		2022		2023		2024		2022	2023	2024
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	%	%	%
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	256	1	255	1	255	1	241	1	253	1	209	100	100	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	Persentase	100		100		100		100		100		100		100	100	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	11	1	13	1	13	1	8,4	1	8,9	1	8,3	100	100	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	65	6	67	10	70	1	49,6	1	53	1	52	100	16,7	10,0
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	16	2	21	5	21	1	13,9	1	17	1	12	100	50	20
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	100	4	138	4	140	4	86,9	4	125	4	85	100	100	100
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	73	3	65	3	70	1	19,3	3	14,3	3	8	100	100	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	1	7	1	13	1	15	1	7,1	1	11,9	1	11	100	100	100

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Capaian Kinerja		
				2022		2023		2024		2022		2023		2024		2022	2023	2024
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	%	%	%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	31	12	37	12	37	1	18,7	12	9	12	0	100	100	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	254	12	320	12	320	1	202	12	179	12	167	100	100	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD	Persentase	100	550	100	560	100	700	100	280	100		100		100	100	100
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	100	150	100	150	100	150		22		87		88	-	-	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	100	150	100	150	100	150		0		0		0	-	-	-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	40	250	40	250	50	300		258		198		98	-	-	-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	0	0	2	10	20	100		-		7		-	-	-	-

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Capaian Kinerja		
				2022		2023		2024		2022		2023		2024		2022	2023	2024
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	%	%	%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase	100	1,608	100	1,692	100	1,692	100		100		100		-	-	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	132	12	150	12	150	12	119	12	128	12	136	100	100	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1,476	12	1,542	12	1,542	12	1,427	12	1,490	12	1,978	100	100	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik	Persentase	100		100		100								N/A	N/A	N/A
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	38	1	38	1	38	1	29	1	38	1	37	100	100	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	20	510	20	650	20	650	20	459	20	555	20	378	100	100	100
	Pemeliharaan	Jumlah Peralatan	Unit	100	196	110	250	250	400		139		195		72			

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Capaian Kinerja		
				2022		2023		2024		2022		2023		2024		2022	2023	2024
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	%	%	%
	Peralatan dan Mesin Lainnya	dan Mesin Lainnya yang Dipelihara																
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	250	1	250	1	250	1	9	1	194	1	226	100	100	100
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Data dan Informasi Kebencanaan yang Tersampaikan	Persentase	N/A	55	80	305	80	305									
	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	Dokumen	0	0	1	250	1	250	N/A	N/A	1	220	N/A	N/A	0	100	N/A
	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Dokumen	24	55	1	55	1	55	1	49	1	49	0	0	100	100	0
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Presentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan penanganan	Persentase	100		100		100		100		100		100		100	100	100
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil	Dokumen	N/A	N/A	5	250	5	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Capaian Kinerja		
				2022		2023		2024		2022		2023		2024		2022	2023	2024
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	%	%	%
		Dokumen Laporan Kaji Cepat																
DIJELASKAN KENAPA SAMPAI TINGGI	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	342	36	260	198	260	198	2746	36	13230	196	4830	181	802,9	5 088,5	1 857,7
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	260	379	260	379	260	379	2100	639	2300	405	2500	556	807,7	884,6	961,5
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Masyarakat yang terlatih terhadap bencana	Persentase															
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	1	50	2	75	2	75		0		0	0	0	N/A	N/A	N/A
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Orang	200	219	200	550	100	550		201	785	433	544	230			
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan	Dokumen	5	150	7	170	7	170	1	736	1	156	1	194	20	14,3	14,3
	Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota		22	1110		100	-	-	-	49,5	-	471	-	-	-	-	-

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Capaian Kinerja		
				2022		2023		2024		2022		2023		2024		2022	2023	2024
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	%	%	%
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Unit	5	32	150	150	150	150	-	471	N/A	471	-	-	-	-	-
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Unit	-	-	8	150	8	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Orang	-	-	50	100	100	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Dokumen	-	-	2	150	2	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Orang	-	-	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	0	0	300	100	300	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : Hasil Evaluasi BPBD Kota Bogor, 2025

Tabel 2.16.
Target dan Realisasi Indikator Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020-2024

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Target					Realisasi					Capaian (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Jumlah warga negara yang memperoleh Layanan informasi rawan bencana	492.202	492.202	492.202	492.202	492.202	315.572	2.963	3.195	28.200	65.608	64,1 %	0,6 %	0,7 %	5,7 %	13,3 %
2	Jumlah warga negara yang memperoleh Layanan pencegahan dan kesiap siagaan Terhadap bencana	492.202	492.202	492.202	492.202	492.202	241.188	2.963	3.195	3.869	35.658	49,0 %	0,6 %	0,7 %	0,8 %	7,2 %
3	Jumlah warga negara yang memperoleh Layanan penyelamatan dan evakuasi Korban bencana	3000	3000	3000	3000	3000	2727	2963	2730	13230	4.830	90,9 %	98,8 %	91,0 %	441,0 %	161,0 %
	Indikator Kinerja Kunci															

Sumber : Hasil Evaluasi BPBD Kota Bogor, 2025

Dalam Rencana Strategis BPBD 2019-2024, telah ditetapkan sebanyak 3 Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan urusan Bidang Trantibumlimnas pas sub urusan bencana.. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja kunci sebagaimana dijelaskan di atas, masih terdapat - dari 2 indikator kinerja kunci yang sampai dengan tahun 2024 belum mencapai target antara lain

1. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
2. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapiagaan terhadap bencana

Tabel 2.17.
Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat pada Indikator Kinerja Kunci BPBD Kota Bogor

Indikator Kinerja Kunci	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Permasalahan	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	layanan informasi rawan bencana didukung oleh pemanfaatan media sosial, khususnya Instagram, yang memiliki jumlah pengikut cukup banyak sehingga informasi dapat tersebar secara lebih luas dan cepat. Selain itu, adanya kegiatan sosialisasi secara langsung ke berbagai lapisan masyarakat, terutama melalui jalur sekolah, turut mendorong peningkatan jangkauan layanan informasi. Kombinasi antara penyebaran informasi digital dan edukasi tatap muka tersebut memperkuat kesadaran masyarakat terhadap potensi bahaya bencana sekaligus meningkatkan aksesibilitas informasi kebencanaan bagi seluruh kelompok masyarakat.	Perencanaan yang kurang matang menyebabkan target indikator layanan informasi rawan bencana belum sepenuhnya menggambarkan sasaran pelayanan secara riil. Selain itu, penetapan target yang terlalu besar tidak sebanding dengan kapasitas dan kondisi di lapangan, sehingga pencapaiannya menjadi sulit terpenuhi secara optimal.	Target layanan informasi rawan bencana tidak realistis dan tidak sesuai dengan kondisi riil sasaran.	Menargetkan capaian indikator sesuai dengan kondisi riil dan kapasitas yang ada, serta memperkuat perencanaan melalui pemetaan sasaran yang lebih akurat dan realistis
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Pencapaian indikator jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana didorong oleh tingginya minat masyarakat dan kelurahan untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, seperti pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana (Katana), pelaksanaan gladi kesiapsiagaan, serta peningkatan kapasitas dan layanan pencegahan maupun kesiapsiagaan lainnya. Selain itu, keberlangsungan kegiatan tersebut juga semakin kuat karena telah mendapat dukungan dari kebijakan	Target indikator jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana ditetapkan terlalu besar dan tidak sebanding dengan kapasitas yang ada. Selain itu, perencanaan target yang kurang matang membuat sasaran layanan belum sepenuhnya menggambarkan kondisi riil di lapangan,	Target layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana tidak realistis dan tidak sesuai dengan kondisi riil sasaran	Menargetkan capaian indikator sesuai dengan kondisi riil dan kapasitas yang ada, serta memperkuat perencanaan melalui pemetaan sasaran yang lebih akurat dan realistis

Sumber : Hasil Evaluasi BPBD Kota Bogor, 2025

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPBD di Penanggulangan Bencan, kelompok sasaran pelayanan BPBD adalah sebagai berikut:

Tabel 2.18.
Kelompok Sasaran Pelayanan BPBD Kota Bogor

No	Kelompok Sasaran	Kegiatan Layanan
(1)	(2)	(3)
1.	Masyarakat yang terdampak dan menjadi korban bencana	Pelayanan Pengiriman Barang bantuan berupa Terpal, sembako, barang lainya dari btt ataupun provinsi serta Pelayannan hunian sementara bagi para korban bencana
2.	Masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana serta masyarakat yang menjadi korban pada fase pasca bencana.	Pelayanan penyediaan data penduduk terpilah di daerah rawan bencana dan Fasilitasi Koordinasi penanganan Pasca bencana meliputi Sektor : Infrastruktur, Perumahan dan Permukiman, Ekonomi, Sosial dan Lintas Sektor
3.	Masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana serta masyarakat luas yang memerlukan peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan kemampuan dalam menghadapi potensi bencana	Penyuluhan atau sosialisasi mirigasi bencana dan Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas kesiapsiagaan.

Sumber : Hasil Analisa BPBD Kota Bogor, 2025

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Layanan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPBD di bidang Penanggulangan Bencana, yang menjadi mitra dalam pemberian pelayanan BPBD adalah sebagai berikut:

Tabel 2.19.
Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan

No	Nama Kerjasama	Mitra Kerjasama
(1)	(2)	(3)
1	Pengembangan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik (Koordinasi Survei Calon Lokasi Pemasangan Display Warning)	BMKG
2	Penyediaan logistik darurat, peralatan penanggulangan bencana, serta gudang dan distribusi. Dan Pelatihan, bimbingan teknis, sertifikasi, serta pendidikan kebencanaan bagi ASN BPBD dan relawan.	BNPB
3	Perbantuan dalam status tanggap darurat pengerahan personel untuk evakuasi, pencarian dan pertolongan (SAR), serta pengamanan lokasi bencana.	TNI/POLRI
4	Penanganan Pengungsian, Dapur Umum, Distribusi Logistik, Dan Layanan Dukungan Psikososial.	TAGANA

No	Nama Kerjasama	Mitra Kerjasama
(1)	(2)	(3)
5	Melaksanakan operasi SAR dan pelaksana utama pencarian dan pertolongan korban hilang.	BASARNAS

Sumber : BPBD Kota Bogor, 2025

2.1.6.Inovasi Perangkat Daerah, dengan format sebagai berikut.

Tabel 2.20.
Inovasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor

No	Inovasi Eksisting			Rencana		
	Nama Inovasi	Tahun	Gambaran Inovasi	Nama Inovasi	Tahun	Gambaran Inovasi
1	2	3	4	5	6	7
1	EWS Longsor	2021-2023	EWS longsor merupakan seperangkat alat yang dirancang untuk mendeteksi potensi terjadinya longsor sejak dini, lalu memberikan peringatan kepada masyarakat maupun pemerintah agar bisa melakukan langkah pencegahan atau evakuasi sebelum bencana terjadi	Mitigasi Keliling	2025-2030	Melakukan keliling dengan kendaraan roda tiga untuk menelusuri wilayah yang sulit dijangkau dalam rangka penyebaran edukasi dan sosialisasi informasi kebencanaan
2	Peta Digital	2023	Applikasi yang menghasilkan data kejadian bencana dan peta operasi meliputi lokasi kejadian, lokasi pengungsian, jalur / rute operasi, lokasi faskes, topografi	Dapur Kebencanaan	2025-2030	Dialog Akselerasi Penanganan Urusan Kebnecanaan

Sumber : BPBD Kota Bogor, 2025

2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang selanjutnya telah diturunkan dalam Peraturan Daerah Kota

tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor bahwa tugas BPBD merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah Kota Bogor. Sedangkan secara fungsi. BPBD memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana dengan bertindak cepat dan tepat, efektif, dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana selama kurun waktu Tahun 2019-2024, dan berdasarkan hasil analisa dan telaahan dokumen RPJMD Kota Bogor 2025-2029, RTRW Kota Bogor 2011-2031, KLHS RPJMD Kota Bogor 2025-2029, RPJMN/Renstra Kementerian/Lembaga, dan RPJMD Propinsi Jabar/ Renstra Jabar, serta Dokumen KRB dan RPB telah antara lain:

Tabel 2.21.
Permasalahan Perangkat Daerah

No.	Permasalahan RPJMD	Permasalahan KLHS	Permasalahan RTRW	Renstra K/L	Renstra PD Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Masih belum optimalnya pencegahan dan kesiapsiagaan (mitigasi bencana) serta penanganan pasca bencana	Belum optimalnya upaya pembangunan berketahanan iklim dan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.	Belum Optimalnya Penyediaan Jalur evakuasi bencana yang terjangkau dan Pendataan dan pemetaan ruang dan jalur evakuasi bencana	Perubahan iklim global turut meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologi.	Risiko bencana masih relatif tinggi meski mengalami penurunan dengan kategori sedang	Fasilitas pendukung seperti logistik, peralatan evakuasi, sistem peringatan dini (EWS), dan posko masih belum memadai
					Masih Rendahnya Ketahanan Daerah dalam penanggulangan bencana di Jawa Barat	Terdapat perencanaan logistik yang belum optimal dan tidak sesuai dengan kebutuhan penanggulangan bencana.
						Terdapat kelemahan dalam perencanaan target sasaran kinerja
						Ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana masih rendah.

No.	Permasalahan RPJMD	Permasalahan KLHS	Permasalahan RTRW	Renstra K/L	Renstra PD Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						Keterbatasan dan Informasi Data yang valid

Sumber: Hasil Evaluasi BPBD Kota Bogor, 2025
 Ringkasan Eksekutif Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) Rencana Pembangunan Jnagnka Menengah Daerah (RP JMD) Kota Bogor Tahun 2025-2029 (Hal 5), (Hal 10)
 Perda No 6 Perubahan RTRW (Lampiran IV – 29)
 Ringkasan RPJMN Tahun 2025–2029 (hal 25)
 RPJMD PROVINSI JABAR hal II-372
 Ranhiair Renstra BPBD JABAR II-32

Berdasarkan hasil telaah dan identifikasi permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat sejumlah isu utama yang masih menjadi kendala dalam pencapaian kinerja, di antaranya adalah:

1. Belum optimalnya pencegahan dan kesiapsiagaan (mitigasi bencana) serta penanganan pasca bencana.
2. Belum optimalnya kualitas perencanaan dalam penanggulangan bencana
3. Belum optimalnya penyediaan logistik sesuai dengan kebutuhan Penyelamatan Korban bencana.
4. Belum optimalnya ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia dalam penanggulangan bencana.
5. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana.
6. belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan berisiko bencana
7. Belum optimalnya administrasi dan sinergisitas dalam pengelolaan serta penyaluran barang bantuan penanggulangan bencana.

Apabila dilakukan evaluasi secara lebih mendalam, dapat disimpulkan bahwa permasalahan pokok sebagaimana telah diuraikan sebelumnya pada dasarnya muncul akibat beberapa faktor penyebab tertentu. Faktor-faktor tersebut berperan signifikan dalam memengaruhi pencapaian kinerja perencanaan BPBD Kota Bogor, sehingga perlu dianalisis lebih lanjut untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai akar permasalahan yang dihadapi, diantaranya adalah:

Tabel 2.22.
Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Perangkat Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Risiko, kerentanan dan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana dan adaptasi dampak perubahan iklim masih perlu perhatian dan pengelolaan risiko yang terukur	Belum optimalnya pencegahan dan kesiapsiagaan (mitigasi bencana) serta penanganan pasca bencana.	Kualitas perencanaan yang belum berbasis data risiko secara komprehensif, sehingga program pencegahan belum tepat sasaran.
		Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, seperti sistem peringatan dini

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Kurangnya koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah dalam penanggulangan bencana
	Belum optimalnya kualitas perencanaan dalam penanggulangan bencana	Proses penyusunan dokumen belum banyak melibatkan masyarakat, akademisi, dan dunia usaha.
		Program dan kegiatan dalam Renstra/Renja BPBD belum sepenuhnya difungsikan secara efektif sebagai instrumen untuk mencapai sasaran, serta belum seluruhnya didukung dengan alokasi anggaran yang memadai
		Target kinerja dalam dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja) belum sepenuhnya ditetapkan secara tepat berdasarkan hasil analisis, serta belum dimanfaatkan secara optimal sebagai ukuran keberhasilan
	Belum optimalnya penyediaan logistik sesuai dengan kebutuhan Penyelamatan Korban bencana.	Pengelolaan logistik belum didukung tenaga yang memiliki kompetensi di bidang manajemen logistik kebencanaan.
	Belum optimalnya ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia dalam penanggulangan bencana.	masih banyak SDM yang belum memiliki sertifikasi, keterampilan teknis, maupun pengalaman penanggulangan bencana yang standar.
	Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana.	Program penyuluhan, atau pelatihan kebencanaan belum menjangkau seluruh wilayah rawan bencana.
	belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan berisiko bencana	masih terdapat pembangunan di kawasan rawan bencana yang tidak sesuai peruntukan tata ruang.
		sinergi antara BPBD, Dinas PUPR, dan instansi terkait lainnya belum maksimal.
	Belum optimalnya administrasi dan sinergisitas dalam pengelolaan serta penyaluran barang bantuan penanggulangan bencana.	alur pengelolaan logistik tidak selalu sesuai SOP.
		jumlah dan kompetensi petugas yang menangani administrasi serta distribusi bantuan masih terbatas.

Sumber: RPJMD 2025-2029

2.2.2. Penetapan Isu Strategis

Isu-isu strategis pembangunan di Kota Bogor pada dasarnya disusun dengan berangkat dari berbagai permasalahan pembangunan daerah yang telah teridentifikasi, tantangan yang akan dihadapi, serta potensi yang dapat dimanfaatkan di masa mendatang. Perumusan isu-isu tersebut mencakup berbagai dimensi pembangunan, baik yang bersifat fisik dan lingkungan, sosial dan budaya, ekonomi dan keuangan, maupun kelembagaan dan aspek legal.

Dalam konteks perencanaan pembangunan jangka menengah, isu strategis yang dirumuskan dalam RPJMD Kota Bogor Tahun 2025–2029 memiliki peranan penting sebagai landasan awal dalam upaya mewujudkan visi, misi, serta arah

pembangunan Kota Bogor yang telah ditetapkan di dalam dokumen RPJPD Kota Bogor Tahun 2025–2045. Dengan demikian, RPJMD berfungsi sebagai penghubung yang menyinergikan tujuan jangka panjang daerah dengan kebutuhan pembangunan jangka menengah, sekaligus menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah, termasuk BPBD Kota Bogor dalam penyusunan Rencana Strategis agar selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Identifikasi isu-isu strategis dilakukan melalui penggalian dari berbagai sumber pada level yang berbeda, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Sumber-sumber tersebut meliputi:

1. Isu strategis yang berasal dari dinamika global dan dinilai memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap Kota Bogor;
2. Isu strategis yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2025–2029;
3. Isu strategis yang diturunkan dari Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Jawa B
4. arat Tahun 2025–2029;
5. Isu strategis yang termuat dalam RPJPD Kota Bogor Tahun 2025–2045;
6. Isu strategis hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Bogor Tahun 2025–2029;
7. Isu strategis yang terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bogor Tahun 2011–2031; serta
8. Isu strategis yang muncul dari analisis perangkat daerah, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor.

Dengan memperhatikan keseluruhan sumber tersebut, perumusan isu strategis pembangunan Kota Bogor untuk periode RPJMD 2025–2029 dilakukan secara lebih sistematis dan menyeluruh. Selanjutnya, sintesis dari isu-isu strategis tersebut disajikan secara lebih terperinci pada tabel berikut:

Tabel 2.23.
Isu Strategis BPBD Kota Bogor

Ruang Lingkup Pelayanan PD	Permasalahan Kota Bogor 2025-2020	Isu KLHS RPJMD Kota Bogor 2025-2029	Isu Lingkungan Dinamis				Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Isu Nasional dalam RPJMN 2025-2029	Isu Regional dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025-2029	Isu Regional dalam RPJPD Kota Bogor 2025-2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
urusan trantibumlinmas sub urusan sub urusan bencana	Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	Belum optimalnya upaya pembangunan berketahanan iklim dan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Perubahan iklim, cuaca ekstrem, hilangnya Kehati, dan persaingan atas sumber daya alam	Tingkat pencemaran dan degradasi lingkungan yang semakin tinggi di perkotaan, ditambah dengan rendahnya ketangguhan perkotaan terhadap risiko bencana dan perubahan iklim	Perkembangan penduduk dan kebutuhan pembangunan fisik memerlukan pengaturan dan penataan ruang yang dapat mengakomodir kebutuhan ruang budidaya sekaligus melindungi ruang berfungsi lindung guna menjamin penyediaan jasa ekosistem lingkungan yang berkelanjutan.	Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim global	Penguatan sistem pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan bencana serta peningkatan penangan pascabencana melalui kolaborasi multipihak, pemanfaatan teknologi informasi, dan peningkatan kapasitas masyarakat berbasis ketangguhan daerah.
	Belum optimalnya pelayanan kebutuhan dasar masyarakat terjangkau dan perbaikan darurat dalam bencana (ISU KAPASITAS)				Perlindungan terhadap lingkungan dan ekosistem wilayah untuk memperkuat fungsi daya dukung dan daya tampung lingkungan secara berkelanjutan menghadapi tekanan pembangunan, risiko dampak perubahan iklim, dan kerawanan bencana		Kualitas perencanaan penanggulangan bencana yang adaptif, terukur, dan berbasis data serta analisis risiko melalui pemanfaatan sistem informasi terintegrasi.

Ruang Lingkup Pelayanan PD	Permasalahan Kota Bogor 2025-2020	Isu KLHS RPJMD Kota Bogor 2025-2029	Isu Lingkungan Dinamis				Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Isu Nasional dalam RPJMN 2025-2029	Isu Regional dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025-2029	Isu Regional dalam RPJPD Kota Bogor 2025-2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Masih banyaknya penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana						Sistem penyediaan dan distribusi logistik kebencanaan yang cepat, tepat, dan berbasis kebutuhan melalui optimalisasi manajemen kebutuhan logistik
							Sumber daya manusia kebencanaan yang profesional, adaptif, dan responsif terhadap dinamika risiko bencana.
							Memperhatikan aspek kerentanan bencana, keberlanjutan lingkungan, dan ketahanan daerah untuk pengoptimalan pemanfaatan ruang wilayah.

Sumber:
 RPJMD Kota Bogor 2025-2029
 RRB 2024-2028

Berdasarkan telaahan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa BPBD memiliki 4 (empat) isu strategis pada periode 2025–2029, antara lain:

1. Penguatan sistem pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan bencana serta peningkatan efektivitas penanganan pascabencana melalui kolaborasi multipihak, pemanfaatan teknologi informasi, dan peningkatan kapasitas masyarakat berbasis ketangguhan daerah.
2. Kualitas perencanaan penanggulangan bencana yang adaptif, terukur, dan berbasis data serta analisis risiko melalui pemanfaatan sistem informasi terintegrasi.
3. Sistem penyediaan dan distribusi logistik kebencanaan yang cepat, tepat, dan berbasis kebutuhan melalui optimalisasi manajemen kebutuhan logistik
4. Sumber daya manusia kebencanaan yang profesional, adaptif, dan responsif terhadap dinamika risiko bencana.
5. Memperhatikan aspek kerentanan bencana, keberlanjutan lingkungan, dan ketahanan daerah untuk pengoptimalan pemanfaatan ruang wilayah.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Tujuan merupakan kondisi ideal yang hendak dicapai atau diwujudkan dalam kurun waktu lima tahun. Sementara itu, sasaran adalah pernyataan yang lebih terperinci dan bersifat spesifik, yang menunjukkan ketercapaian tujuan melalui hasil dari penyelenggaraan upaya pembangunan, dalam hal ini diukur dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Tingkat keberhasilan tujuan dan sasaran dapat dievaluasi dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator berfungsi sebagai instrumen pengukuran capaian kinerja, baik pada tingkat kegiatan, program, sasaran, maupun tujuan, yang mencakup keluaran (output), hasil (outcome), serta dampak (impact). Akan tetapi, dalam konteks ini, indikator difokuskan sebagai alat ukur capaian kinerja pada level outcome dan impact. Oleh karena itu, penetapan indikator memiliki peran penting dalam memberikan arah dan batasan pelaksanaan pembangunan agar pemanfaatan sumber daya dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dengan demikian, perumusan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja merupakan langkah strategis yang menjadi pijakan dalam penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara menyeluruh.

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Bogor Tahun 2025–2029 merupakan turunan dari Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih, sekaligus menjadi landasan utama dalam merumuskan prioritas pembangunan Kota Bogor selama periode lima tahun ke depan. Rumusan Visi Kota Bogor Tahun 2025–2029 berfungsi sebagai arah dan pedoman pembangunan hingga tahun 2029. Visi dan Misi tersebut telah dituangkan secara resmi dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2025–2029. Dalam proses perumusannya, arah pembangunan jangka panjang daerah juga menjadi pertimbangan penting, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bogor Tahun 2025–2045. Selain itu, perumusan visi turut memperhatikan dinamika perkembangan kondisi daerah, permasalahan yang muncul, tantangan pembangunan yang dihadapi, serta isu-isu strategis baik pada lingkup global, nasional, maupun regional. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Visi Kota Bogor Tahun 2025–2029 ditetapkan sebagai berikut:

“Bogor Beres, Bogor Maju”

Penjabaran visi di atas adalah sebagai berikut :

Bogor Beres artinya mengajak seluruh lapisan masyarakat dari semua latar belakang yang memiliki kesamaan tekad untuk bekerja sama membangun Kota Bogor sampai beres. Beres tidak hanya bermakna menata secara fisik, tetapi menata kualitas secara keseluruhan, termasuk beres pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan warga kota. Beres juga mengandung makna bahwa untuk bergerak kedepan, permasalahan (lama) yang masih ada perlu

diselesaikan (dibereskan) segera. Tidak mungkin kota bergerak maju kedepan jika permasalahan dasar masih belum terurai.

Bogor Maju artinya membangun kemajuan Kota Bogor. Kemajuan sering kali ditandai dengan perkembangan ekonomi dan teknologi (atau inovasi). Hal ini juga menjadi salah satu pilar dari kemajuan Kota Bogor. Namun, kemajuan ini perlu juga disokong dengan pilar-pilar lainnya, termasuk kota yang memiliki kebudayaan dan karakter masyarakat yang kuat, manusia yang berkualitas, serta infrastruktur yang memadai.

Misi dirumuskan sebagai upaya untuk mengoperasionalkan langkah-langkah strategis dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Rumusan misi pada dasarnya merupakan penjabaran dari visi, yang menjelaskan arah serta tahapan upaya yang perlu ditempuh. Kehadiran misi tidak hanya menjadi penuntun, tetapi juga memberikan batasan yang jelas dalam proses pencapaian tujuan pembangunan. Dengan demikian, guna merealisasikan visi yang telah ditetapkan, pembangunan daerah akan dilaksanakan melalui empat misi utama sebagai berikut:

Adapun 4 (empat) Misi yang ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Kota Bogor Tahun 2025- 2029 yaitu:

1. Bogor Cerdas, mencerminkan perwujudan kualitas intelektualitas manusia, tata kelola pembangunan, dan pelayanan publik. Dengan demikian, misi ini memastikan ketersediaan fasilitas dan perluasan akses pendidikan yang merata, terjangkau, berkelanjutan, berkeadilan 145 untuk seluruh lapisan masyarakat, serta memberdayakan lembaga pendidikan formal dan non formal. Selain itu, misi ini juga memastikan pengelolaan pembangunan yang baik, disertai dengan aparatur yang cerdas dan pelayanan publik yang semakin prima dan inovatif.
2. Bogor Sehat, mencerminkan perwujudan kualitas warga dan lingkungan yang sehat. Dengan demikian, misi ini memastikan setiap warga Kota Bogor mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang memadai dan berkualitas untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia. Selain itu, misi ini juga memastikan penciptaan kualitas lingkungan binaan dan hidup yang menopang kesehatan dan kualitas hidup warganya.
3. Bogor Sejahtera, mencerminkan perwujudan peningkatan kualitas ekonomi kota yang berkeadilan. Dengan demikian, misi ini memastikan peningkatan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif yang inovatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Bogor Lancar, mencerminkan perwujudan peningkatan kualitas mobilitas dan tata ruang. Dengan demikian, misi ini berupaya untuk menjadikan Kota Bogor sebagai kota yang nyaman, modern, dan siap menghadapi tantangan masa depan dengan mengatasi kemacetan lalu lintas serta mengoptimalkan fasilitas publik.

Dengan memperhatikan Visi dan Misi Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Bogor Tahun 2025-2029, tugas utama BPBD secara langsung mendukung ketercapaian Misi Ke-2 RPJMD Kota Bogor Tahun 2025-2029 Yaitu Mewujudkan Bogor Sehat dengan tujuan Terwujudnya lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat, nyaman, efisien dan layak huni (Smart Living), dengan 1 Sasaran RPJMD yaitu Menurunnya risiko bencana di seluruh wilayah.

3.1.1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD

BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) menangani urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Trantibumlimnas), khususnya dalam sub urusan kebencanaan, maka Komponen perencanaan jangka menengah BPBD Kota Bogor merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan daerah yang dituangkan ke dalam tujuan yang hendak dicapai, sasaran-sasaran yang lebih spesifik, strategi sebagai upaya pencapaian, serta arah kebijakan yang menjadi pedoman dalam penentuan program dan kegiatan. Seluruh komponen tersebut disusun untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD Kota Bogor dalam kurun waktu lima tahun, dengan tujuan mewujudkan pembangunan yang selaras dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) BPBD dan RPJMD Kota Bogor pada urusan kebencanaan. Rincian mengenai komponen perencanaan tersebut dapat dilihat secara lebih jelas pada tabel berikut.

Tabel 3.1.1.
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

No	NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
							Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
1	Sasaran RPJMD: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Serta Menguatnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah			IK Sasaran RPJMD: SAKIP Tingkat Kota	Predikat	BB (78,29)	BB (79,6)	A (80,01)	A (80,65)	A (81,15)	A (81,5)	A (82)
		Tujuan: Terwujudnya penurunan risiko bencana		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	79.27	80	80.1	80.2	80.3	80.4	80.5
			Sasaran: Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan di lingkungan Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Nilai (poin)	BB (75.15)	A (80.85)	A (80.90)	A (80.95)	A (81.00)	A (81.05)	A (81.1)
2	Sasaran RPJMD: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Serta Menguatnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah			Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Terwujudnya penurunan risiko bencana daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	79.27	80	80.1	80.2	80.3	80.4	80.5
			Sasaran: Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan di lingkungan Perangkat Daerah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Bpk/Itda	Persen	100	100	100	100	100	100	100

No	NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
							Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
3	Sasaran RPJMD: Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Indeks pelayanan Publik	Indeks	4.65	4.65	4,66	4.67	4.68	4.69	4.7
		Terwujudnya penurunan risiko bencana daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	79.27	80	80.1	80.2	80.3	80.4	80.5
				Indeks Kepuasan Masyarakat di Lingkup Perangkat Daerah	Indeks	3.54	3.58	3.62	3.66	3.70	3.74	3.78
				Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi Inovasi Daerah dengan tingkat Kematangan >100	Inovasi	N/A	1	1	1	1	1	1
4	Sasaran RPJMD: Menurunnya Risiko Bencana di seluruh wilayah			IK : Indeks Risiko Bencana	Poin	58,03	58,03	58,02	58,02	58,01	58,01	58,00
		Tujuan: Terwujudnya penurunan risiko bencana daerah		IK : Indeks Risiko Bencana	Poin	58,03	58,03	58,02	58,02	58,01	58,01	58,00
			Sasaran : Meningkatkan kualitas pencegahan dan penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,76	0,76	0,77	0,77	0,78	0,78	0,79

Sumber : BPBD Kota Bogor, 2025

3.1.2. Arah Kebijakan dan Strategi Renstra Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, perlu dirumuskan Arah Kebijakan dan Strategi yang menjadi dasar pencapaian Rencana Strategis BPBD Kota Bogor Tahun 2025–2029. Arah Kebijakan berfungsi sebagai seperangkat prioritas kebijakan yang menjadi pedoman dalam mencapai tujuan, sasaran, visi, dan misi Pemerintah Kota Bogor, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara sinergis, terarah, dan berkesinambungan. Sementara itu, Strategi merupakan langkah-langkah operasional yang lebih spesifik, yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan organisasi, sekaligus menjadi peta jalan bagi pembangunan jangka menengah sebagaimana tertuang dalam rencana strategis organisasi. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka dalam penyusunan Rencana Strategis BPBD Kota Bogor Tahun 2025–2029, Arah Kebijakan dan Strategi untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.1.2.
Arah Kebijakan dan Strategi Renstra Perangkat Daerah

No	Operasionalisasi NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Strategi Renstra PD
1	2	3	4	5
1	Sasaran 2.1.3. Menurunnya risiko bencana di seluruh wilayah	Meningkatkan kualitas pencegahan dan penanggulangan bencana	Memperkuat kapasitas masyarakat dalam bencana	Meningkatkan sosialisasi bencana melalui perluasan papan peringatan kawasan bencana, mengembangkan kelurahan tangguh bencana
			Pengembangan sistem peringatan dini terpadu, khususnya untuk penanganan banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem	Mengembangkan sistem peringatan dini terpadu melalui penyediaan Early Warning System (EWS) pada kawasan rawan bencana, khususnya banjir dan tanah longsor, serta memperkuat penyebaran informasi peringatan rawan bencana pada cuaca extreme secara cepat dan luas melalui pemanfaatan media sosial.
			Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan pendekatan sosial kolaboratif	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui pendekatan sosial kolaboratif dengan mengembangkan Kelurahan Tangguh Bencana, SPAB dan memperluas kegiatan sosialisasi kebencanaan lainnya.
			Pemenuhan dan pendistribusian logistik secara optimal sesuai dengan SOP	Mengoptimalkan pemenuhan dan pendistribusian logistik sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) melalui penguatan manajemen logistik dan sarana prasarana pendukung.

No	Operasionalisasi NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Strategi Renstra PD
1	2	3	4	5
			Pemenuhan dan pendistribusian peralatan penanggulangan bencana secara optimal sesuai dengan SOP	Mengoptimalkan pemenuhan dan pendistribusian peralatan penanggulangan bencana sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.
			Penguatan sarana dan prasarana pelatihan dan standarisasi kompetensi SDM di bidang kebencanaan	Mendorong pemberdayaan riset dan pemanfaatan teknologi kebencanaan untuk mendukung efektivitas penanggulangan bencana serta meningkatkan kompetensi SDM di bidang kebencanaan.
			Pemberdayaan riset dan teknologi kebencanaan	
			Pengembangan inovasi untuk skema alternatif pembiayaan PB dengan melibatkan integrasi kolaborasi pentahelix	Mengembangkan inovasi skema alternatif pembiayaan penanggulangan bencana melalui integrasi dan kolaborasi pentahelix (pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media).

Sumber: BPBD Kota Bogor, 2025
RPB Kota Bogor 2024-2028

3.2. PENTAHAPAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Dalam upaya menetapkan prioritas serta tahapan perencanaan strategis jangka menengah, diperlukan adanya pentahapan yang jelas dalam pelaksanaan prioritas Rencana Strategis Perangkat Daerah. Pentahapan tersebut harus selaras dengan arah dan kerangka Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2025–2029. Hal ini menjadi penting agar setiap program dan kegiatan yang dirumuskan oleh perangkat daerah, termasuk BPBD Kota Bogor, yang terlaksana secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan. pada rencana strategis , pentahapan ini memiliki arti strategis mengingat urusan kebencanaan bersifat lintas sektor, membutuhkan respon cepat, serta menuntut adanya kesiapsiagaan jangka pendek, menengah, hingga panjang. Oleh karena itu, tahapan perencanaan pada Renstra BPBD 2025–2029 tidak hanya diarahkan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, tetapi juga memastikan bahwa penanggulangan bencana, mulai dari aspek pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, hingga tanggap darurat dan pemulihan, dapat diintegrasikan dengan program penanggulangan bencana. Dengan demikian, pentahapan Renstra BPBD Kota Bogor harus dirancang secara adaptif terhadap dinamika risiko bencana yang berkembang, sekaligus konsisten dengan arah kebijakan RPJMD 2025–2029, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut berikut ini:

Tabel 3.2.
Pentahapan Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah

Tahun	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tahapan RPJMD	Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia yang Menopang Daya Saing Daerah	Pengembangan Kapasitas dan Transformasi Digital Pemerintahan	Transformasi Ekonomi Kreatif Menuju Inovasi Inklusif	Inovasi untuk Keberlanjutan dan Ketahanan Perkotaan	Konsolidasi Capaian dan Fondasi Menuju Kota Sains Kreatif
Fokus Utama	Fokus pembangunan diarahkan pada akselerasi pemerataan dan kualitas sarana prasarana penanggulangan Bencana , meningkatkan kualitas pendidikan sekolah SPAB , serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana yang berfokus pada sasaran masyarakat yang berada di lokasi rawan bencana . Selain itu, perlu untuk memperkuat Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kota dan TRC	Fokus pembangunan diarahkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan institusi melalui integrasi tim penanggulangan bencana di tingkat kota serta pengembangan sistem yang terintegrasi. Transformasi digital dilakukan melalui implementasi peta digital yang menggambarkan potensi dan persebaran bencana di Kota Bogor, serta pengembangan dan penambahan sistem peringatan dini (EWS) di wilayah rawan bencana berisiko tinggi.	Fokus pembangunan diarahkan pada penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang mempertimbangkan kebijakan ekonomi daerah sebagai bagian dari perencanaan strategis. Selain itu, upaya ini juga menitikberatkan pada penguatan mitigasi bencana dan penyediaan informasi wilayah rawan bencana melalui pengembangan berbagai inovasi. Inovasi tersebut secara khusus menyasar masyarakat rentan yang tinggal di wilayah berisiko tinggi, dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas adaptasi, ketahanan komunitas, serta pelibatan aktif masyarakat dalam pengurangan risiko bencana secara berkelanjutan.	Fokus pembangunan mencakup pemanfaatan inovasi dan teknologi dalam rangka mendorong optimalisasi upaya pengelolaan risiko bencana, dengan tujuan utama untuk menurunkan tingkat risiko bencana secara berkelanjutan. Upaya ini sekaligus mendorong dan mendukung penyusunan dokumen perencanaan yang sah dan legal, bersifat strategis, serta menjadi acuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di berbagai tingkatan. Selain itu, pembangunan juga diarahkan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat melalui pelatihan mitigasi bencana, serta memperkuat sistem kewaspadaan dini dengan pengembangan dan penambahan jumlah Early Warning System (EWS) di wilayah rawan bencana dan Aplikasi Peta Digital.	Pada tahun terakhir pelaksanaan RPJMD, Pemerintah Kota Bogor memfokuskan arah pembangunan pada proses konsolidasi hasil-hasil yang telah dicapai serta merumuskan strategi akselerasi untuk memasuki fase penguatan pada periode perencanaan berikutnya. Langkah ini dimaksudkan sebagai fondasi dalam mewujudkan Kota Bogor sebagai kota sains kreatif. Sejalan dengan itu, BPBD Kota Bogor juga menyusun Rencana Kontinjensi terhadap berbagai potensi bencana dengan tingkat risiko tinggi di wilayah Kota Bogor, guna memastikan kesiapsiagaan, mitigasi, dan respons cepat dalam menghadapi ancaman bencana yang mungkin terjadi.

Sumber: BPBD Kota Bogor, 2025

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN URUSAN

4.1 PENJENJANGAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Penjenjangan kinerja merupakan suatu mekanisme sistematis yang berfungsi untuk menguraikan serta menyelaraskan sasaran strategis, indikator kinerja, hingga target kinerja organisasi secara berjenjang dari tingkat tertinggi sampai pada unit kerja pelaksana. Proses ini memastikan adanya keterhubungan yang konsisten antara tujuan jangka panjang organisasi dengan capaian nyata di lapangan. Dengan adanya penjenjangan kinerja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai peran dan kontribusinya dalam mendukung pencapaian visi, misi, serta tujuan strategis Pemerintah Daerah.

Dalam Perencanaan target yang telah ditetapkan akan dievaluasi secara transparan, serta seluruh kegiatan yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Di sisi lain, penjenjangan kinerja juga memiliki fungsi penting dalam mengarahkan penggunaan anggaran agar lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien. Dengan demikian, setiap alokasi sumber daya yang tersedia dapat benar-benar dimanfaatkan untuk mendukung upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, maupun rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Kota Bogor.

Dalam perencanaan BPBD Kota Bogor, penjenjangan kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan menjadi instrumen strategis untuk mengukur sejauh mana kinerja organisasi dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, terutama dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Melalui penjenjangan ini, diharapkan BPBD mampu menjaga konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan kinerja, sehingga kualitas layanan publik di bidang kebencanaan dapat semakin ditingkatkan. Adapun rincian penjenjangan kinerja pelayanan BPBD Kota Bogor secara lebih detail dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1.
Penjeangan Kinerja Pelayanan BPBD Kota Bogor

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja	Satuan	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sasaran RPJMD: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Serta Menguatnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah					IK Sasaran RPJMD: SAKIP Tingkat Kota			
	<u>Tujuan</u> Terwujudnya penurunan risiko bencana daerah				Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks		
		<u>Sasaran:</u> Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan di lingkungan Perangkat Daerah			Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Nilai (Poin)		

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja	Satuan	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan di lingkungan Perangkat Daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	<u>Program 1 : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</u>	
							<u>Kegiatan 1 :</u>	
				Terpenuhinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu	Persen	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Persentase Realisasi fisik kegiatan di lingkup perangkat daerah	Persen		
					Persentase Realisasi anggaran kegiatan di lingkup perangkat daerah	Persen		
							<u>Sub Kegiatan:</u>	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
							<u>Aktivitas :</u>	
							Pembuatan dan pencetakan Laporan-laporan perencanaan (RENJA, RENSTRA, RKA, RPB, Kajian Logistik)	
							<u>Sub Kegiatan:</u>	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
							<u>Aktivitas :</u>	
							Pembuatan dan pencetakan Laporan-laporan Capaian	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja	Satuan	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Kinerja (LPPD, LKIP, SPM, LKPJ, LHE)	
Sasaran RPJMD: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Serta Menguatnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah					IK Sasaran RPJMD: Opini BPK	Predikat		
	Tujuan Terwujudnya penurunan risiko bencana daerah				Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks		
		Sasaran : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di lingkungan Perangkat Daerah			Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Bpk/Itida	Persen		
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan di lingkungan Perangkat Daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan		Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	Persen	Program 1 : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
							Kegiatan 2 :	
				Terpenuhinya Kualitas	Persentase penyampaian laporan	Persen		

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja	Satuan	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel	keuangan bulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA	Persen		
							Sub Kegiatan:	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
							Aktivitas :	
							Tersedianya Gaji dan Tunjangan Bagi ASN	
							Sub Kegiatan:	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
							Aktivitas :	
							Laporan Keuangan Honor PA, PPK-SKPD, Bendahara Pengeluaran, PPTK	
Sasaran RPJMD: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik					IK Sasaran RPJMD: Indeks Pelayanan Publik			
	Tujuan Terwujudnya penurunan risiko bencana daerah				Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks		
		Sasaran: Meningkatnya kualitas tata kelola			Indeks Kepuasan Masyarakat di Lingkup Perangkat Daerah	Indeks		

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja	Satuan	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		pemerintahan di lingkungan Perangkat Daerah			Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi Inovasi Daerah dengan tingkat Kematangan >100	Inovasi		
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan di lingkungan Perangkat Daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan		Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	Program 1 : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan Setiap Tahun	Inovasi		
							<u>Kegiatan 3 :</u>	
				Terpenuhinya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Persentase pemenuhan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Persen	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
							<u>Sub Kegiatan:</u>	
				Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
							<u>Aktivitas</u>	
							Penyusunan Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	
							<u>Kegiatan 4 :</u>	
				Terpenuhinya Kebutuhan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
							<u>Sub Kegiatan:</u>	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
							<u>Aktivitas :</u>	
							Terlaksananya pengadaan pakaian dinas untuk Petugas TRC BPBD dan Pegawai BPBD	
							<u>Kegiatan 5 :</u>	
				Terpenuhinya	Persentase pemenuhan Kebutuhan	Persen	Administrasi Umum Perangkat	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja	Satuan	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	operasional perangkat daerah		Daerah	
							<u>Sub Kegiatan :</u>	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
							<u>Aktivitas :</u>	
							Tersedianya Komponen Peralatan Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	
							<u>Sub Kegiatan :</u>	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket dan Peralatan Kantor yang disediakan	Paket	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
							<u>Aktivitas :</u>	
							Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
							<u>Sub Kegiatan :</u>	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
							<u>Aktivitas :</u>	
							Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	
							<u>Sub Kegiatan :</u>	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
							<u>Aktivitas :</u>	
							Tersedianya bahan logistik untuk penunjang operasional kantor	
							<u>Sub Kegiatan :</u>	
				Tersedianya Barang dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
							<u>Aktivitas :</u>	
							Tersedianya Pencetakan SpandukDan lain lain	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja	Satuan	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Sub Kegiatan :	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
							Aktivitas :	
							Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan (Majalah Kebencanaan dan Publikasi Pada Media Online Lokal (Publikasi/ Tayang))	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
							Sub Kegiatan :	
							Aktivitas :	
							Tersedianya Biaya dan Transport Perjalanan Dinas Luar Daerah	
							Kegiatan 6 :	
				Terpenuhinya pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan sesuai RKBMD	Persen	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
							Sub Kegiatan :	
				Tersedianya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
							Aktivitas :	
							Terlaksananya pengadaan kendaraan operasional untuk menunjang operasional pelayanan	
				Tersedianya Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Pengadaan Mebel	
							Sub Kegiatan :	
							Aktivitas :	
							Tersedianya mebel untuk menunjang pelaksanaan	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja	Satuan	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Unit	operasional kantor	
							Sub Kegiatan :	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
							Aktivitas :	
							Tersedianya peralatan dan mesin lainnya untuk menunjang pelaksanaan operasional kantor dan diluar kantor	
							Sub Kegiatan :	
							Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
							Aktivitas :	
							Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya untuk menunjang kebutuhan operasional kantor	
							Gudang Barang	
							Parkir Kendaraan	
							Sub Kegiatan :	
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
							Aktivitas :	
							Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk menunjang kebutuhan operasional pelayanan kantor	
							Ruang Laktasi	
							Ruang Rapat dan Galeri Kebencanaan	
							Area Meroko dan Ruang Tunggu	
							Kegiatan 7 :	
				Terpenuhinya Jasa Penunjang urusan Pemerintahan	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja	Satuan	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Sub Kegiatan :	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
							Aktivitas :	
							Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik untuk menunjang kebutuhan operasional kantor	
							Tersedianya Pembayaran Tagihan Sumber Daya Air dan Listrik serta Internet	
							Sub Kegiatan :	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
							Aktivitas :	
							Tersedianya Jasa Pelayanan Umum untuk menunjang kebutuhan	
							Kegiatan 8 :	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Lingkup Perangkat Daerah Berkondisi Baik	Persen	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
							Sub Kegiatan :	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
							Aktivitas :	
							Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Roda Empat / Dinas Jabatan untuk operasional pelayanan	
							Sub Kegiatan :	
				Tersedianya Jasa	Jumlah Kendaraan Dinas	Unit	Tersedianya Pemeliharaan	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja	Satuan	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Kendaraan dinas Lapangan	
							Aktivitas : Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Roda Empat / Dinas Operasional untuk operasional pelayanan	
							Sub Kegiatan :	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
							Aktivitas : Tersedianya pemeliharaan semua peralatan kebutuhan operasional kantor	
							Sub Kegiatan :	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
							Aktivitas : Tersedianya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor untuk menunjang operasional pelayanan kantor	
							Sub Kegiatan :	
				Terlaksananya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
							Aktivitas : Tersedianya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja	Satuan	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							kantor untuk menunjang operasional pelayanan kantor	
							Rangka dan Atap Kanopi Lahan Parkiran	
Sasaran RPJMD: Menurunnya Risiko Bencana di Seluruh Wilayah	-				IK : Indeks Risiko Bencana	Poin		
	Tujuan : Terwujudnya penurunan risiko bencana daerah				Indeks Risiko Bencana	Poin		
		Sasaran : Meningkatkan kualitas pencegahan dan penanggulangan bencana			Indeks Ketahanan Daerah	Poin		
			Optimalisasi Upaya Pengelolaan Risiko Bencana		Persentase SPAB	Persen	Program 2 : Penanggulangan Bencana	
				Terlaksananya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Warga yang telah mendapatkan pelayanan informasi rawan bencana	Persen	Kegiatan 1 : Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	#SPMPrioritas
							Sub Kegiatan :	#SPMPrioritas

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja	Satuan	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dikawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada dikawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Orang	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	
							Aktifitas	
							Sosialisasi ke lapisan masyarakat dan ke berbagai sekolah yang berada di zona rawan bencana untuk pembentukan SPAB	
							Sub Kegiatan :	
				Terlaksananya Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB)	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	#SPMPrioritas
							Aktifitas	
Sasaran RPJMD: Menurunnya Risiko Bencana di Seluruh Wilayah	-				IK : Indeks Risiko Bencana	Poin		
	Tujuan : Terwujudnya penurunan risiko bencana daerah				IK : Indeks Risiko Bencana	Poin		
		Sasaran : Meningkatnya kualitas			Indeks Ketahanan Daerah	Poin		

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja	Satuan	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		pencegahan dan penanggulangan bencana						
			Optimalisasi Upaya Pengelolaan Risiko Bencana		Persentase Kelurahan tangguh bencana	Persen	Program 2 : Penanggulangan Bencana -	
					Persentase logistik dan peralatan yang terpenuhi dalam penanganan bencana	Persen		
							Kegiatan 2 :	
				Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase sarana yang diterima masyarakat untuk mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	#SPMPrioritas
					Persentase Jumlah aparaturnya dan warga negara yang mengikuti pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Persen		
							Sub Kegiatan :	
				Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Unit	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	#SPMPrioritas
							Aktifitas	
							Tersedianya Peralatan Perlindungan untuk para warga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana dan penyediaan EWS banjir dan Tanah Longsor	
							Sub Kegiatan :	
				Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	Orang	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	#SPMPrioritas

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja	Satuan	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warganegara di kawasan rawan bencana				
							<u>Aktifitas</u>	
							Terlaksananya Gladi Kesiapsiagaan Bencana Kota Bogor dalam memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional dan pelaksanaan Table of Exercise	
							<u>Sub Kegiatan :</u>	
				Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Kawasan	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	
							<u>Aktivitas</u>	
							Terlaksananya Penguatan Kapasitas Kelurahan tangguh bencana yang telah dibentuk	
							<u>Sub Kegiatan :</u>	
				Meningkatnya kompetensi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor untuk penanganan awal darurat bencana	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	Orang	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	
							<u>Aktifitas</u>	
							Terlaksananya Pengembangan Kapasitas dan Kompetensi Petugas TRC	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja	Satuan	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Tingkat Kota dalam penanganan bencana	
							<u>Sub Kegiatan :</u>	
				Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	Penyusunan Rencana Kontinjensi	#SPMPrioritas
							<u>Aktifitas</u>	
							Tersusunnya Rencana Kontinjensi dalam menanggulangi bencana di Kota Bogor	
							<u>Sub Kegiatan :</u>	
				Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	
							<u>Aktivitas</u>	
							Tersusunnya Rencana Penanggulangan Kedaruratan dalam menanggulangi keadaan darurat bencana	
							<u>Sub Kegiatan :</u>	
				Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayananyangsahdanle gal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Laporan	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	#SPMPrioritas
							<u>Aktivitas</u>	
							Terlaksananya Layanan Pusat Pengendalian Operasi dan	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja	Satuan	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Tersedianya Sarana Prasarana Kesiapsiagaan	
							Sub Kegiatan :	
				Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	#SPMPrioritas
							Aktivitas	
							Tersusunnya Rencana Penanggulangan Bencana untuk Kota Bogor	
							Sub Kegiatan :	
				Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warganegara term asuk kelompok rent andi kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dikawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kawasan	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	#SPMPrioritas
							Aktivitas	
							Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kota Bogor dalam Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana	
Sasaran RPJMD: Menurunnya Risiko Bencana di Seluruh Wilayah	-				IK : Indeks Risiko Bencana	Poin		
	Tujuan : Terwujudnya penurunan risiko bencana daerah				IK : Indeks Risiko Bencana	Poin		
		Sasaran : Meningkatkan kualitas pencegahan dan			Indeks Ketahanan Daerah	Poin		

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja	Satuan	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		penanggulangan bencana						
			Optimalisasi Upaya Pengelolaan Risiko Bencana		Persentase logistik dan peralatan yang terpenuhi dalam penanganan bencana	Persen	Program 2 : Penanggulangan Bencana	
							Kegiatan 3 :	
				Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Jiwa yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	#SPMPrioritas
							Sub Kegiatan :	
				Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	#SPMPrioritas
							Aktifitas	
							Satgas Pengiriman Barang (Terpal, sembako, barang lainya dari btt ataupun provinsi dll)	
							Sub Kegiatan :	
				Tersusunnya dokumen rencana operasi kedaruratan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	Dokumen	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	
							Aktifitas	
							dokumen rencana operasi kedaruratan bencana Kabupaten/Kota	
							Sub Kegiatan :	
				Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja	Satuan	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Aktivitas	
							Tersedianya logistik penyelamatan dan evakuasi untuk korban bencana	
							Pengiriman Barang Bantuan	
Sasaran RPJMD: Menurunnya Risiko Bencana di Seluruh Wilayah	-				IK : Indeks Risiko Bencana	Poin		
	Tujuan : Terwujudnya penurunan risiko bencana daerah				IK : Indeks Risiko Bencana	Poin		
		Sasaran : Meningkatnya kualitas pencegahan dan penanggulangan bencana			Indeks Ketahanan Daerah	Poin		
			Optimalisasi Upaya Pengelolaan Risiko Bencana		Persentase ketersediaan data kelurahan yang berada di kawasan berisiko bencana tinggi	Persen	Program 2 : Penanggulangan Bencana	
							Kegiatan 4 :	
				Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencan	Persentase dokumen Data dan Informasi Kebencanaan yang Tersampaikan	Persen	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
							Sub Kegiatan :	
				Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan	Dokumen	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja	Satuan	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	dalam Penanggulangan Bencana		Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
							<u>Aktivitas</u>	
							Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	
							Forum Konsultasi Publik untuk pelayanan penanggulangan bencana	
							<u>Sub Kegiatan :</u>	
				Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan	Dokumen	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem	
							<u>Aktivitas</u>	
							Terkelolanya Sistem Pemeliharaan Peta Digital dan EWS	
							<u>Sub Kegiatan :</u>	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	
							<u>Aktivitas</u>	
							Pengawasan kegiatan Huntara, BSTT dan BTT	
							<u>Sub Kegiatan :</u>	
				Meningkatnya kompetensi teknis dan manajerial SDM aparatur penanggulangan bencanapadasetiaptahan (Pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana)	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	Orang	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja	Satuan	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Work Shop tim penyelenggara sosialisasi atau pelatihan penanggulangan bencana	
				Terlaksananya koordinasi lintasperangkatdaerahp ada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya danketersediaan APBD, non APBDdansumberpenda naan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pasca bencana disemua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana(R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	Kegiatan	WorkShop tim Jitupasna	
							Sub Kegiatan :	
							Koordinasi penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota	
							Aktifitas	
				Tersedianya data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	Jumlah data penduduk terpilah didaerah rawan bencana	Laporan	Jasa Tenaga Teknis Harian dalam Koordinasi antar OPD dan assessment Rumah atau bangunan terdampak pada saat Pasca Bencana	
							Sub Kegiatan :	
							Fasilitasi pengumpulan data penduduk didaerah rawan bencana lintas Kab/Kota	
							Aktifitas	
				Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca	Dokumen	Kajian Kebutuhan Data Penduduk di Daerah Rawan Bencana	
							Sub Kegiatan :	
							Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja	Satuan	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal	bencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1(satu) tahun		(JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	
							Aktifitas	
							Kajian Kebutuhan Pasca Bencana	

Sumber: BPBD Kota Bogor, 2025

4.2 PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH

Rangkaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, serta alokasi Pendanaan yang menjadi tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor disusun secara sistematis dalam dokumen Rencana Strategis. Penyajian informasi tersebut dituangkan dalam tabel berikut, dengan tujuan memberikan gambaran yang lebih terstruktur mengenai arah pembangunan bidang kebencanaan. Melalui tabel ini, dapat terlihat keterkaitan antara program utama, kegiatan yang dilaksanakan, hingga sub kegiatan yang lebih rinci, beserta kebutuhan pendanaan yang dialokasikan untuk mendukung pencapaiannya.

Penyusunan program dan kegiatan ini sekaligus menjadi instrumen penting bagi BPBD Kota Bogor dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, khususnya dalam urusan penanggulangan bencana yang mencakup aspek pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Dengan demikian, tabel di bawah ini tidak hanya berfungsi sebagai daftar rencana kerja dan anggaran, tetapi juga sebagai pedoman pelaksanaan yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah Kota Bogor Tahun 2025–2029 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor tersaji dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.2.
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

Outcome (Sasaran Progran)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Program 1 : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					8,024,560, 487		12,337,804 ,248		12,603,602 ,648		13,119,486 ,148		13,999,05 7,548
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan di lingkungan Perangkat Daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	75.15	80.90		80.95		81.00		81.05		81.1	
			Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	Persen	N/A	100		100		100		100		100	
			Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	85.62	87.62		88.62		89.62		90.62		91.62	
			Jumlah Inovasi yang dibangun/dikem bangkan Setiap Tahun	Inovasi	N/A	1		1		1		1		1	
		Kegiatan 1 :													
	Terpenuhinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu	Persen	100	100	4,000,000	100	10,500,000	100	11,000,000	100	11,500,000	100	12,000,00 0
			Persentase Realisasi fisik kegiatan di lingkup	Persen	100	100		100		100		100		100	

Outcome (Sasaran Progran)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			perangkat daerah												
			Persentase Realisasi anggaran kegiatan di lingkup perangkat daerah	Persen	100	100		100		100		100		100	
		<u>Sub Kegiatan:</u>													
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	5	2,000,000	5	5,500,000	5	6,000,000	5	6,500,000	5	7,000,000
		<u>Aktivitas :</u>													
-	-	Pembuatan dan pencetakan Laporan-laporan perencanaan													
		<u>Sub Kegiatan:</u>													
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	N/A	5	2,000,000	5	5,000,000	5	5,000,000	5	5,000,000	5	5,000,000
-	-	<u>Aktivitas :</u>													

Outcome (Sasaran Progran)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
-	-	Pembuatan dan pencetakan Laporan-laporan Capaian Kinerja													
		Kegiatan 2 :													
	Terpenuhinya Kualitas Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	Persen	100	100	3,731,336,990	100	5,426,990,748	100	6,232,963,748	100	7,038,936,748	100	7,844,909,748
			Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA	Persen	93.00	100		100		100		100		100	
		Sub Kegiatan:													
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	18 Orang/Bulan	22	3,636,896,990	33	5,331,470,748	38	6,137,443,748	43	6,943,416,748	48	7,749,389,748
		Aktivitas :	Out Put												
-	-	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Bagi ASN	Dokumen SPJ Gaji dan Tunjangan												
		Sub Kegiatan													
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	Laporan	12	12	94,440,000	12	95,520,000	12	95,520,000	12	95,520,000	12	95,520,000

Outcome (Sasaran Progran)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semest eran SKPD		Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semestera n SKPD												
-	-	Aktivitas :	Out Put												
-	-	Laporan Keuangan Honor PA, PPK- SKPD, Bendahara Pengeluaran, PPTK	Dokumen Keuangan												
-	Terpenuhinya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Kegiatan 3 : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Persen	N/A	100	3,000,000	100	3,100,000	100	3,200,000	100	3,300,000	100	3,400,000
-	-	Sub Kegiatan :													
-	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	N/A	1	3,000,000	1	3,100,000	1	3,200,000	1	3,300,000	1	3,400,000
-	-	Aktivitas :													
-	-	Penyusunan Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah													
		Kegiatan 4 :													
	Terpenuhinya Kebutuhan Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian	Persen	100	100	409,388,00 0	100	330,000,00 0	100	340,000,00 0	100	350,000,00 0	100	360,000,0 00

Outcome (Sasaran Progran)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Perangkat Daerah												
		Sub Kegiatan:													
	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	8	4	409,388,000	4	330,000,000	4	340,000,000	4	350,000,000	4	360,000,000
-	-	Aktivitas :													
		Terlaksananya pengadaan pakaian dinas untuk Petugas TRC BPBD dan Pegawai BPBD													
		Kegiatan 5 :													
	Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	Persen	100	100	651,825,530	100	666,791,700	100	686,741,000	100	826,416,000	100	812,541,000
		Sub Kegiatan :													
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	17,602,800	1	18,500,000	1	19,000,000	1	19,800,000	1	19,900,000
-	-	Aktivitas :													
		Tersedianya Komponen Peralatan Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor													
		Sub Kegiatan :													

Outcome (Sasaran Progran)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket dan Peralatan Kantor yang disediakan	Paket	1	1	39,902,330	1	50,000,000	1	55,000,000	1	60,000,000	1	75,000,000
-	-	Aktivitas : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
		Sub Kegiatan :													
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	38,700,700	1	39,700,700	1	39,800,000	1	39,900,000	1	40,000,000
-	-	Aktivitas : Tersedianya Peralatan Rumah Tangga													
		Sub Kegiatan :													
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	300,334,200	1	167,594,000	1	169,944,000	1	233,719,000	1	174,644,000
-	-	Aktivitas :													
-	-	Tersedianya bahan logistik untuk penunjang operasional kantor													
		Sub Kegiatan :													
	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	15,594,500	1	21,000,000	1	22,000,000	1	23,000,000	1	24,000,000
-	-	Aktivitas :													

Outcome (Sasaran Progran)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
-	-	Tersedianya Pencetakan Spanduk dan lain lain													
		Sub Kegiatan :													
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	38,997,000	1	38,997,000	1	38,997,000	1	38,997,000	1	38,997,000
-	-	Aktivitas :													
-	-	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan (Majalah Kebencanaan dan Publikasi Pada Media Online Lokal (Publikasi/ Tayang))													
		Sub Kegiatan :													
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	200,694,000	12	331,000,000	12	342,000,000	12	411,000,000	12	440,000,000
-	-	Aktivitas :													
-	-	Tersedianya Biaya dan Transport Perjalanan Dinas Luar Daerah													
		Kegiatan 6 :													
	Terpenuhinya	Pengadaan Barang	Persentase	Persen	100	100	125,083,80	100	1,973,336,	100	1,163,612,	100	547,248,40	100	430,121,8

Outcome (Sasaran Progran)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD	Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan sesuai RKBMD				0		800		900		0		00
		<u>Sub Kegiatan :</u>													
	Tersedianya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	N/A	N/A	N/A	1	972,389,400	2	743,291,500	2	77,076,000	2	77,076,000
-	-	<u>Aktivitas :</u>													
-	-	Terlaksananya pengadaan kendaraan operasional untuk menunjang operasional pelayanan													
		<u>Sub Kegiatan :</u>													
	Tersedianya Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	Unit	N/A	2	10,000,000	13	68,634,300	4	27,371,600	5	140,000,000	1	7,194,700
-	-	<u>Aktivitas :</u>													
-	-	Tersedianya mebel untuk menunjang pelaksanaan operasional kantor													
		<u>Sub Kegiatan :</u>													
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	N/A	23	76,083,800	22	182,313,100	17	212,949,800	12	330,172,400	11	345,851,100

Outcome (Sasaran Progran)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			yang Disediakan												
		Aktivitas :													
-	-	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya untuk menunjang pelaksanaan operasional kantor dan diluar kantor													
		Sub Kegiatan :													
	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	N/A	N/A	1	150,000,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Aktivitas :													
-	-	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya untuk menunjang kebutuhan operasional kantor													
		Sub Kegiatan :													
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	1	39,000,0000	1	600,000,000	1	180,000,000	N/A	N/A	N/A	N/A
		Aktivitas :													
-	-	Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk menunjang kebutuhan													

Outcome (Sasaran Progran)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		operasional pelayanan kantor													
		Kegiatan 7 :													
	Terpenuhinya Jasa Penunjang urusan Pemerintahan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	2,122,062,586	100	2,470,085,000	100	2,570,085,000	100	2,670,085,000	100	2,770,085,000
		Sub Kegiatan :													
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Su mber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	157,037,538	12	170,085,000	12	170,085,000	12	170,085,000	12	170,085,000
-	-	Aktivitas :													
-	-	Tersedianya Pembayaran Tagihan Sumber Daya Air dan Listrik serta Internet													
		Sub Kegiatan :													
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	1,965,025,048	12	2,300,000,000	12	2,400,000,000	12	2,500,000,000	12	2,600,000,000
-	-	Aktivitas :													
-	-	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum untuk menunjang kebutuhan operasional													

Outcome (Sasaran Progran)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		pelayanan kantor													
		Kegiatan 8 :													
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Lingkup Perangkat Daerah Berkondisi Baik	Persen	100	100	977,863,581	100	1,457,000,000	100	1,596,000,000	100	1,672,000,000	100	1,766,000,000
		Sub Kegiatan :													
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	38,000,000	1	40,000,000	3	120,000,000	3	120,000,000	4	160,000,000
		Aktivitas :													
-	-	Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Roda Empat / Dinas Jabatan untuk operasional pelayanan													
		Sub Kegiatan :													
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan	Unit	10	21	670,208,100	27	760,000,000	29	780,000,000	31	820,000,000	33	850,000,000

Outcome (Sasaran Progran)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Operasional atau Lapangan		Pajak dan Perizinannya												
-	-	Aktivitas :													
-	-	Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan dinas Lapangan													
		Sub Kegiatan :													
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		152	169,655,481	68	320,000,000	69	350,000,000	70	380,000,000	71	400,000,000
-	-	Aktivitas :													
-	-	Tersedianya pemeliharaan semua peralatan kebutuhan operasional kantor													
		Sub Kegiatan :													
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100,000,000	1	185,000,000	1	190,000,000	1	195,000,000	1	198,000,000
-	-	Aktivitas :													
-	-	Tersedianya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor untuk menunjang operasional pelayanan kantor													
		Sub Kegiatan :													
	Terlaksananya Pemeliharaan/Reh	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan	Jumlah Sarana dan Prasarana	Unit	N/A	N/A	N/A	3	152,000,000	3	156,000,000	3	157,000,000	3	158,000,000

Outcome (Sasaran Progran)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	abilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi												
-	-	Aktivitas : Tersedianya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor untuk menunjang operasional pelayanan kantor													
-	-	Rangka dan Atap Kanopi Lahan Parkiran													
		Program 2: Penanggulangan Bencana					2,070,758,653		2,736,748,153		2,693,912,580		2,580,920,001		2,544,632,826
Optimalisasi Upaya Pengelolaan Risiko Bencana	-	-	IK : Persentase logistik dan peralatan yang terpenuhi dalam penanganan bencana	Persen	100	100		100		100		100		100	
			IK : Persentase Kelurahan tangguh bencana	Persen	36.76	47.06		52.94		58.82		64.71		70.59	
			IK : Persentase SPAB	Persen	N/A	0.57		1.15		1.72		2.30		2.87	
			IK : Persentase	Persen	N/A	21.43		42.86		64.29		82.14		100	

Outcome (Sasaran Progran)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			ketersediaan data kelurahan yang berada di kawasan berisiko bencana tinggi												
	Terlaksananya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	<u>Kegiatan 1 :</u> Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Warga yang telah mendapatkan pelayanan informasi rawan bencana	Persen	N/A	100	38,149,000	100	198,649,000	100	38,649,000	100	38,649,000	100	38,649,000
	Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawanbencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancamanbencanayang ada di kawasan tempat tinggalnya	<u>Sub Kegiatan :</u> Sosialisasi,Komunikasi,Informasi dan Edukasi(KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (PerJenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dikawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi,komunikasi,informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada dikawasan tempat tinggalnya	Orang	N/A	450	38,149,000	450	38,649,000	450	38,649,000	450	38,649,000	450	38,649,000

Outcome (Sasaran Progran)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			selama 1 (satu) tahun												
		Aktifitas													
-	-	Sosialisasi ke lapisan masyarakat dan ke berbagai sekolah yang berada di zona rawan bencana untuk pembentukan SPAB													
		Sub Kegiatan :													
	Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang Sah dan Legal	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	N/A	N/A	N/A	1	160,000,00 0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Aktifitas													
-	-	Tersusnya Kajian Risiko Bencana untuk Kota Bogor													
		Kegiatan 2 :													
	Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase sarana yang diterima masyarakat untuk mitigasi dan	Persen	100	100	917,698,90 1	100	1,324,403, 701	100	1,455,518, 001	100	1,237,995, 401	100	1,176,355, 001

Outcome (Sasaran Progran)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			kesiapsiagaan terhadap bencana												
			Persentase Jumlah aparaturnegara yang mengikuti pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Persen	100	100		100		100		100		100	
		Sub Kegiatan :													
	Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana dikawasan tempat tinggalnya	Unit	N/A	280	469,282,200	438	593,051,800	433	458,367,200	433	458,367,200	434	458,367,200
-	-	Aktifitas													
-	-	Tersedianya Peralatan Perlindungan untuk para warga yang ditujukan sebagai kesiapsiagaan terhadap bencana													
		Sub Kegiatan :													

Outcome (Sasaran Progran)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warganegara di kawasan rawan bencana	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	Orang	350	575	37,989,701	575	37,989,701	575	37,989,701	575	37,989,701	575	37,989,701
-	-	Aktifitas													
-	-	Terlaksananya Gladi Kesiapsiagaan Bencana Kota Bogor dalam memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional dan pelaksanaan Table of Exercise													
		Sub Kegiatan :													
	Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan strategis Kabupaten/Kota	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan	Kawasan	N/A	27	54,525,000	N/A	N/A	N/A	N/A	40	75,000,000	N/A	N/A

Outcome (Sasaran Progran)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana		strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana												
		Aktivitas													
		Terlaksananya Penguatan Kapasitas Kelurahan Tangguh Bencana yang telah dibentuk													
		Sub Kegiatan :													
	Meningkatnya kompetensi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor untuk penanganan awal darurat bencana	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	Orang	N/A	55	20,950,000	60	77,720,000	65	82,750,000	70	87,780,000	75	92,810,000
		Aktivitas													
-	-	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas dan Kompetensi Petugas TRC tingkat kota													

Outcome (Sasaran Progran)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		dalam penanganan bencana													
		Sub Kegiatan :													
	Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancamanbencana) yang sah dan legal	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	N/A	3	150,000,000	1	50,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000
		Aktifitas													
		Tersusnya Rencana Kontijensi dalam menanggulangi bencana di Kota Bogor													
		Sub Kegiatan :													
	Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan KedaruratanBencana (RPKB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1	Dokumen	N/A	N/A	N/A	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000

Outcome (Sasaran Progran)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			(satu) tahun												
		Aktivitas													
		Tersusunnya Rencana Penanggulangan Kedaruratan dalam menanggulangi keadaan darurat bencana													
		Sub Kegiatan :													
	Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops)dengan Maklumat Pelayananyangsah danlegal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Laporan	N/A	N/A	N/A	12	110,408,600	12	184,887,500	12	22,334,900	12	30,664,500
		Aktivitas	-												
		Terlaksananya Layanan Pusat Pengendalian Operasi dan Tersedianya Sarana Prasarana Kesiapsiagaan													
		Sub Kegiatan :													
	Penanggulangan	Penyusunan	Jumlah	Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	135,000,00	N/A	N/A	N/A	N/A

Outcome (Sasaran Progran)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun								0				
		Aktivitas													
		Tersusunnya Rencana Penanggulangan Bencana untuk Kota Bogor													
		Sub Kegiatan :													
	Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warganegara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dikawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kawasan	2	5	184,952,00 0	4	405,233,60 0	4	406,523,60 0	4	406,523,60 0	4	406,523,6 00
-	-	Aktifitas													
-	-	Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kota Bogor dalam Pembentukan Kelurahan Tangguh													

Outcome (Sasaran Progran)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Bencana													
		Kegiatan 3 :													
	Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Jiwa yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	100	837,069,15 2	100	851,673,85 0	100	917,283,97 5	100	982,894,10 0	100	1,104,247, 325
		Sub Kegiatan :													
	Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Pencarian,Pertolong an dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	4,830	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
-	-	Aktifitas													
-	-	Satgas Pengiriman Barang (Terpal, sembako, barang lainya dari btt ataupun provinsi dll)													
		Sub Kegiatan :													
	Tersusunnya dokumen rencana operasi kedaruratan bencana Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	Dokumen	N/A	N/A	N/A	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,00 0

Outcome (Sasaran Progran)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
-	-	Aktifitas													
-	-	dokumen rencana operasi kedaruratan bencana Kabupaten/Kota													
		Sub Kegiatan :													
	Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	2500 Jiwa	3,100	837,069,152	3,150	801,673,850	3,200	867,283,975	3,250	932,894,100	3,300	1,054,247,325
-	-	Aktifitas													
-	-	Tersedianya logistik penyelamatan dan evakuasi untuk korban bencana													
		Kegiatan 4 :													
	Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencan	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase dokumen Data dan Informasi Kebencanaan yang Tersampaikan	Persen		100	277,841,600	100	362,021,602	100	282,461,604	100	321,381,500	100	225,381,500
		Sub Kegiatan :													
	Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	N/A	1	9,360,000	1	9,360,000	1	9,360,000	1	9,360,000	1	9,360,000

Outcome (Sasaran Progran)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
-	-	Aktivitas													
-	-	Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana dan Forum Konsultasi Publik untuk pelayanan penanggulangan bencana													
		Sub Kegiatan :													
	Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	Dokumen	N/A	N/A	N/A	1	100,000,000	N/A	N/A	1	100,000,000	N/A	N/A
-	-	Aktivitas													
-	-	Terkelolanya dan terpeliharanya Sistem Informasi Kebencanaan													
		Sub Kegiatan :													
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan	N/A	N/A	N/A	12	12,000,000	12	12,000,000	12	12,000,000	12	12,000,000
-	-	Pengawasan kegiatan Huntara, BSTT dan BTT													
		Sub Kegiatan :													
	Meningkatnya kompetensi teknis	Peningkatan Kapasitas SDM	Jumlah SDM aparatur	Orang	N/A	65	29,820,000	N/A	N/A	30	16,440,000	N/A	N/A	N/A	N/A

Outcome (Sasaran Progran)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	dan manajerial SDM aparatur penanggulangan bencanapadasetia ptahapan (Pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana)	Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi												
		Bimbingan Teknis tim penyelenggara sosialisasi atau pelatihan penanggulangan bencana													
		Bimbingan Teknis tim Jitupasna													
		Sub Kegiatan :													
	Terlaksananya koordinasi lintasperangkatda erahpada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya danketersediaanA PBD, non APBDdansumberp endanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah	Koordinasi penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pasca bencana disemua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana(R 3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	Kegiatan	207	217	38,920,000	237	40,920,000	277	44,920,000	317	48,920,000	357	52,920,000

Outcome (Sasaran Progran)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota														
-	-	Aktifitas													
-	-	Jasa Tenaga Teknis Harian dalam Koordinasi antar OPD dan assessment Rumah atau bangunan terdampak pada saat Pasca Bencana													
		Sub Kegiatan :													
	Tersedianya data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	Laporan	N/A	6	148,640,100	6	148,640,102	6	148,640,104	5	100,000,000	5	100,000,000
-	-	Aktifitas													
-	-	Kajian Kebutuhan Data Penduduk di Daerah Rawan Bencana													
		Sub Kegiatan :													
	Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana(R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca bencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana(R	Dokumen	N/A	1	51,101,500	1	51,101,500	1	51,101,500	1	51,101,500	1	51,101,500

Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	(R3P)Kab/Kotayan gsahdan legal		3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1(satu) tahun												
-	-	Aktifitas													
-	-	Kajian Kebutuhan Pasca Bencana													

Sumber: BPBD Kota Bogor, 2025

Tabel 4. 3.
Daftar Sub Kegiatan dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Keterangan
1	2	3	6	4	5	7
Sasaran RPJMD: Menurunnya Risiko Bencana di Seluruh Wilayah	Optimalisasi Upaya Pengelolaan Risiko Bencana		Program 2 : Penanggulangan Bencana -	IK : Persentase logistik dan peralatan yang terpenuhi dalam penanganan bencana	Persen	
				IK : Persentase Kelurahan tangguh bencana	Persen	
				IK : Persentase SPAB	Persen	
				IK : Persentase ketersediaan data kelurahan yang berada di kawasan berisiko bencana tinggi	Persen	
		Terlaksananya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kegiatan 1 : Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Warga yang telah mendapatkan pelayanan informasi rawan bencana	Persen	#SPMPrioritas
		Terlaksananya sosialisasi,	Sub Kegiatan : Sosialisasi,Komunikasi,Informasi	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dikawasan rawan bencana	Orang	#SPMPrioritas

Prioritas	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Keterangan
		komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawanbencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancamanbencanayang ada di kawasan tempat tinggalnya	dan Edukasi(KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (PerJenis Ancaman Bencana)	bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi,komunikasi,informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada dikawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun		
			<u>Aktifitas</u>			#SPMPrioritas
			Sosialisasi ke lapisan masyarakat dan ke berbagai sekolah yang berada di zona rawan bencana untuk pembentukan SPAB			
			<u>Sub Kegiatan :</u>			
		Terlaksananya Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB)	Penyusunan Kajian Risiko Bencana	Jumlah dokumen Kajian Risiko	Dokumen	#SPMPrioritas
			<u>Aktifitas</u>			
			Tersusunnya Kajian Risiko Bencana untuk Kota Bogor			
		Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	<u>Kegiatan 2 :</u>	Persentase sarana yang diterima masyarakat untuk mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	#SPMPrioritas
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Jumlah aparaturnya dan warga negara yang mengikuti pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Persen	
			<u>Sub Kegiatan :</u>			
		Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugasuntukkesiapsiagaan terhadap bencana	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara,Keluarga,maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana dikawasan tempat tinggalnya	Unit	#SPMPrioritas

Prioritas	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Keterangan
		Kabupaten/Kota				
			Aktifitas			
			Tersedianya Peralatan Perlindungan untuk para warga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana dan penyediaan EWS banjir dan Tanah Longsor			
			Sub Kegiatan :			
		Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganandarurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti olehwarganegaradikawasan rawan bencana	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan daruratbencana (per jenisancaman) Kabupaten/Kota	Orang	#SPMPrioritas
			Aktifitas			
			Terlaksananya Gladi Kesiapsiagaan Bencana Kota Bogor dalam memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional dan pelaksanaan Table of Exercise			
			Sub Kegiatan :			
		Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Kawasan	
			Aktivitas			
			Terlaksananya Penguatan Kapasitas Kelurahan tangguh bencana yang telah dibentuk			
			Sub Kegiatan :			
		Meningkatnya kompetensi personil Tim Reaksi Cepat	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah personil TimReaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi	Orang	

Prioritas	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Keterangan	
		Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor untuk penanganan awal darurat bencana	Kabupaten/Kota	untuk penanganan awal darurat bencana			
			Aktifitas				
			Terlaksananya Pengembangan Kapasitas dan Kompetensi Petugas TRC Tingkat Kota dalam penanganan bencana				
			Sub Kegiatan :				
		Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	#SPMPrioritas	
			Aktifitas				
			Tersusunnya Rencana Kontinjensi dalam menanggulangi bencana di Kota Bogor				
			Sub Kegiatan :				
		Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen		
			Aktivitas				
			Tersusunnya Rencana Penanggulangan Kedaruratan dalam menanggulangi keadaan darurat bencana				
			Sub Kegiatan :				
		Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Laporan	#SPMPrioritas	
	Aktivitas						

Prioritas	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Keterangan
			Terlaksananya Layanan Pusat Pengendalian Operasi dan Tersedianya Sarana Prasarana Kesiapsiagaan			
			<u>Sub Kegiatan :</u>			
		Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	#SPMPrioritas
			<u>Aktivitas</u>			
			Tersusunnya Rencana Penanggulangan Bencana untuk Kota Bogor			
			<u>Sub Kegiatan :</u>			
		Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warganegara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kawasan	#SPMPrioritas
			<u>Aktivitas</u>			
			Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kota Bogor dalam Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana			
			<u>Kegiatan 3 :</u>			
		Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Jiwa yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	#SPMPrioritas
			<u>Sub Kegiatan :</u>			
		Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	#SPMPrioritas
			<u>Aktivitas</u>			
			Satgas Pengiriman Barang (Terpal, sembako, barang lainnya dari btt ataupun provinsi dll)			
			<u>Sub Kegiatan :</u>			

Prioritas	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Keterangan
		Tersusunnya dokumen rencana operasi kedaruratan bencana Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	Dokumen	
			<u>Aktifitas</u>			
			dokumen rencana operasi kedaruratan bencana Kabupaten/Kota			
			<u>Sub Kegiatan :</u>			
		Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	
			<u>Aktivitas</u>			
			Tersedianya logistik penyelamatan dan evakuasi untuk korban bencana			
			Pengiriman Barang Bantuan			
			<u>Kegiatan 4 :</u>			
		Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencan	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase dokumen Data dan Informasi Kebencanaan yang Tersampaikan	Persen	
			<u>Sub Kegiatan :</u>			
		Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	
			<u>Aktivitas</u>			
			Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana			
			<i>Forum Konsultasi Publik untuk pelayanan penanggulangan bencana</i>			
			<u>Sub Kegiatan :</u>			
		Tersedianya Data dan	Pengelolaan dan Pemanfaatan	Jumlah Data dan Informasi Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan	Dokumen	

Prioritas	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Keterangan
		Informasi Kebencanaan	Sistem			
			<u>Aktivitas</u>			
			Terkelolanya Sistem Pemeliharaan Peta Digital dan EWS			
			<u>Sub Kegiatan :</u>			
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan	
			<u>Aktivitas</u>			
			Pengawasan kegiatan Huntara, BSTT dan BTT			
			<u>Sub Kegiatan :</u>			
		Meningkatnya kompetensi teknis dan manajerial SDM aparatur penanggulangan bencana pada setiap tahapan (Pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana)	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	Orang	
			<u>Aktivitas</u>			
			Bimbingan Teknis tim penyelenggara sosialisasi atau pelatihan penanggulangan bencana			
			Bimbingan Teknis tim Jitupasna			
			<u>Sub Kegiatan :</u>			
		Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Koordinasi penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pasca bencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	Kegiatan	

Prioritas	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Keterangan
			<u>Aktifitas</u>			
			Jasa Tenaga Teknis Harian dalam Koordinasi antar OPD dan assessment Rumah atau bangunan terdampak pada saat Pasca Bencana			
			<u>Sub Kegiatan :</u>			
		Tersedianya data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	Laporan	
			<u>Aktifitas</u>			
			Kajian Kebutuhan Data Penduduk di Daerah Rawan Bencana			
			<u>Sub Kegiatan :</u>			
		Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca bencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1(satu) tahun	Dokumen	
			<u>Aktifitas</u>			
			Kajian Kebutuhan Pasca Bencana			

Sumber: BPBD Kota Bogor, 2025

Tabel 4.5.
Daftar Sub Kegiatan dalam Mendukung Asta Cita

No.	Bidang Urusan	Asta Cita	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). 2. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Optimalisasi Upaya Pengelolaan Risiko Bencana		Program Penanggulangan Bencana	IK :persentase kelurahan tangguh bencana IK : Persentase Sekolah Pendidikan Aman Bencana (SPAB) IK : Persentase logistik dan peralatan yang terpenuhi dalam penanganan bencana IK : Persentase ketersediaan data kelurahan yang berada di kawasan berisiko bencana tinggi	
				Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kegiatan Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	IK : Persentase aparaturnegara yang mengikuti pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana IK : Persentase sarana yang diterima masyarakat untuk mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana	
				Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	
				Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencan	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencan	Persentase Dokumen Data dan Informasi Kebencanaan yang Tersampaikan	

No.	Bidang Urusan	Asta Cita	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	

Sumber: BPBD Kota Bogor, 2025

4.3 TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DAN INDIKATOR KINERJA KUNCI

Kinerja menggambarkan kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil instansi dihubungkan dengan visi yang diemban organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif dari kebijakan operasional. Untuk dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak diperlukan suatu alat ukur yang disebut indikator kinerja. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD Indikator kinerja Utama (IKU) BPBD Kota Bogor yang mengacu pada tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6.
Tabel Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	Indikator	Satuan	Capaian 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH										
(1)	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Nilai (Poin)	BB (75.15)	A (80.85)	A (80.90)	A (80.95)	A (81.00)	A (81.05)	A (81.1)	
(2)	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/ITDA	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
(3)	Indeks Kepuasan Masyarakat di Lingkup Perangkat Daerah	Indeks	3.54	3.58	3.62	3.66	3.70	3.74	3.78	
(4)	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi Inovasi Daerah dengan tingkat Kematangan >100	Inovasi	N/A	1	1	1	1	1	1	
(5)	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,76	0,76	0,77	0,77	0,78	0,78	0,79	

Sumber: BPBD Kota Bogor, 2025

Selain indikator kinerja utama (IKU) BPBD Kota Bogor sebagaimana dijabarkan diatas, diformulasikan juga Indikator Kinerja yang bertujuan untuk memberi gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan urusan

dan kewenangan daerah. Indikator tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) daerah. Indikator Kinerja Kunci atau yang lebih dikenal dengan key performance indicator (KPI) atau dikenal juga sebagai key success indicators (KSI) membantu organisasi dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Seberapa besar pencapaian IKK tergantung ukuran yang ditentukan Berikutt ini tabel target dan indikator bpbd sebagai penunjang urusan trantibumlimnas sub urusan kebencanaan :

Tabel 4.7.
Tabel Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

No	Indikator	Satuan	Capaian 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
INDIKATOR KINERJA KUNCI										
(1)	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jiwa	65,608	77,908	76,440	131,964	98,800	99,300	107,936	
(2)	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jiwa	35,658	647	1,065	663	668	1,313	738	
(3)	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jiwa	4,830	5.088	5.616	6.144	6.673	7.201	7.729	

Sumber: BPBD Kota Bogor, 2025

4.4 RENCANA PEMENUHAN SPM

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab penting dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar, khususnya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang sub-urusan bencana. Pemenuhan SPM ini menjadi kewajiban daerah untuk memastikan terpenuhinya hak dasar masyarakat atas perlindungan dan keselamatan dari ancaman bencana. Oleh karena itu, BPBD berkewajiban menyusun langkah-langkah strategis dan operasional yang terencana guna menjamin pelaksanaan SPM dapat tercapai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana pemenuhan SPM pada BPBD Kota Bogor diarahkan untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat, mempercepat sistem peringatan dini, serta meningkatkan kapasitas penanganan darurat bencana melalui koordinasi lintas sektor. Selain itu, pemenuhan SPM juga menyasar aspek pencegahan dan mitigasi, seperti penyusunan kajian risiko bencana, penyebaran informasi kebencanaan, penyediaan sarana prasarana penanggulangan bencana, hingga pelaksanaan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

Dalam jangka menengah, pemenuhan SPM ini dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, ketersediaan sumber daya, dan dinamika risiko bencana yang berkembang di Kota Bogor. Dengan demikian, rencana pemenuhan

SPM bukan hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga instrumen penting untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana yang melindungi dan memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat. Berikut ini disajikan rencana pemenuhan SPM BPBD Kota Bogor untuk periode 2025–2029:

Tabel 4.8.
Rencana Pemenuhan SPM Perangkat Daerah

NO	JENIS LAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Capaian							Target Capaian					
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar									
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Urusan Ketentraman dan ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang akan dipenuhi)	Setiap tahun		100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang	Setiap tahun		100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	JENIS LAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Capaian							Target Capaian					
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar									
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
						akan dipenuhi)								

Sumber: BPBD Kota Bogor, 2025

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis BPBD Kota Bogor Tahun 2025-2029 ini merupakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang penyusunannya merupakan pedoman bagi pemerintah Kota Bogor dalam menyusun RPJMD mulai tahun 2025 sampai dengan 2029. Dokumen Renstra ini berisi rangkaian rencana program dan kegiatan pada tugas dan fungsi Penanggulangan Bencana, yang ingin dicapai hingga tahun 2029 ke depan yang dalam penyusunannya melibatkan stakeholders terkait untuk mendapatkan strategi kebijakan yang komprehensif dalam menjawab tantangan dan permasalahan dalam rangka percepatan reformasi birokras serta meningkatkan indeks ketahanan daerah dan menurunkan indeks risiko bencana,.

Renstra BPBD Kota Bogor Tahun 2025-2029 ini juga menjadi pedoman bagi seluruh Seksi/Bidang dan Sekertariat di lingkungan BPBD Kota Bogor dalam menyusun Rencana Kerja setiap tahunnya hingga tahun 2025-2029 serta dijadikan alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Maka diperlukan dukungan komitmen, kesungguhan dan rasa tanggung jawab sesuai tugas dan fungsi BPBD Kota Bogor untuk dapat mendukung Misi 1 dan 2.

Mekanisme monitoring dan evaluasi juga akan dilakukan secara sistematis berbasis RPJMD yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) serta dashboard kinerja daerah. Integrasi ini dimaksudkan untuk memastikan keterhubungan antara perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan, sehingga capaian program dan kegiatan dapat dipantau secara transparan, terukur, dan akuntabel, serta menjadi dasar pengambilan keputusan dalam perbaikan kebijakan di masa yang akan datang.

Untuk itu perlu ditetapkan Kaidak pelaksanaan sebagai berikut:

- Seluruh tujuan, sasaran, indikator, dan program dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2025–2029 ditetapkan selaras dengan dokumen RPJMD Kota Bogor 2025–2029 dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari pencapaian target pembangunan daerah.
- Program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah diprioritaskan untuk mendukung pencapaian Visi Misi Kepala Daerah
- Pelaksanaan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah dievaluasi setiap tahun serta dipertengahan periode dengan menggunakan sistem monitoring dan evaluasi berbasis RPJMD, yang terintegrasi dengan SIPD dan dashboard kinerja daerah.

Demikian Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor Tahun 2025-2029 disusun sebagai wujud pemenuhan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat, tidak hanya bagi jajaran internal BPBD Kota Bogor, tetapi juga bagi Pemerintah Daerah Kota Bogor secara keseluruhan dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan.